



# **TANTANGAN PERAN ANTROPOLOGI DI INDONESIA**

**Yasmine Zaki Shahab**

**Pidato Disampaikan pada Upacara Pengukuhan  
Sebagai Guru Besar Tetap  
Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Indonesia  
Depok, 24 Mei 2006**



***Bismillahirrahmanirrahim***

Yang saya hormati:

Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia

Ketua dan anggota Majelis Wali Amanat Universitas Indonesia

Rektor dan Para Wakil Rektor Universitas Indonesia

Ketua dan anggota Senat Akademik Universitas Indonesia

Ketua Dewan Guru Besar dan segenap Guru Besar Universitas Indonesia

Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik dan para dekan di lingkungan Universitas Indonesia

Para Staf Pengajar dan karyawan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Indonesia

Para mahasiswa Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Indonesia

Hadirin para undangan sekalian yang saya muliakan

***Assalamu alaikum warahmatullahi wa barakatuh  
Salam Sejahtera***

Sebelum kami menyampaikan pidato pengukuhan ini, perkenankanlah kami mengajak para hadirin sekalian untuk memuji syukur kehadiran Allah Subhanahu wa taala karena berkat izin dan rahmatnya kita semua diberikan nikmat sehat sehingga memungkinkan kita semua hadir dalam penyelenggaraan pengukuhan kami sebagai guru besar tetap dalam Bidang Antropologi pada Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Indonesia.

Dengan terselenggaranya peristiwa yang amat penting ini kami ingin mengucapkan terimakasih yang setinggi-tingginya kepada Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia yang telah memberikan kepercayaan mengangkat kami sebagai guru besar tetap pada Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Indonesia. Ucapan terimakasih kami tujukan juga kepada Dekan dan para wakil dekan FISIP UI, Ketua dan anggota Dewan Guru Besar FISIP UI serta teman-teman di bagian kepegawaian yang telah berperan dalam proses pengangkatan kami sebagai Guru Besar FISIP UI. Terimakasih kami juga sampaikan kepada Rektor Universitas Indonesia yang telah memberikan kesempatan kepada kami untuk menyampaikan pidato pengukuhan dihadapan sidang yang terhormat. Ucapan terimakasih juga kami haturkan pada semua pihak yang telah membantu terlaksananya pidato pengukuhan. Kepada panitia penyelenggara terimalah ucapan terimakasih kami yang amat tulus. Akhirnya terimakasih kami kepada hadirin sekalian yang telah meluangkan waktunya yang amat berharga untuk menghadiri penyampaian pidato pengukuhan kami yang berjudul:

## **TANTANGAN PERAN ANTROPOLOGI DI INDONESIA**

Berdasarkan sejarah kelahirannya antropologi tumbuh sebagai disiplin ilmu studi mikro yang diakui kepiawaiannya dalam pendekatan kualitatif. Keahlian antropologi dalam studi kualitatif menyebabkan ilmu ini makin asyik dengan studi mikro sebagai sasaran penelitiannya. Seandainya ada antropolog yang melakukan studi di kota dalam kehidupan moderen maka sasaran studinya tetap studi mikro. Dalam simposium antropologi yang dilaksanakan oleh Departemen Antropologi Universitas Indonesia selama empat tahun berturut-turut yang bertemakan globalisasi,

---

praktis makalah-makalah yang disajikan merupakan studi mikro, tentu saja dengan analisa dan kesimpulan pada tingkat makro. Fokus dari tulisan ini ingin menyoroti bagaimana peran dan posisi antropologi di Indonesia dalam masalah-masalah yang muncul pada tingkat makro.

Saya merasa amat tertantang ketika suami saya berkomentar saat kami menikmati acara berita di televisi :*"Antropolog kemana?"* Komentar ini berulang-ulang terucapkan ketika kami menonton program kerusuhan Ambon, kasus Poso, program Aceh mulai DOM, GAM hingga Tsunami, kasus Papua dan seterusnya, dimana layar kaca praktis ramai berhiaskan wajah para politisi, ekonom, aktifis LSM, tetapi praktis hampir tidak ada wajah antropolog. Padahal kasus-kasus diatas berkaitan erat dengan masalah budaya, masalah etnis namun ahli budaya, ahli etnis absen sebagai selebritis di layar kaca. Mungkin juga situasi ini dapat diartikan bahwa para pembuat kebijaksanaan melihat soal budaya sebagai permasalahan yang akan terselesaikan dengan sendirinya bersamaan dengan diselesaikannya permasalahan ekonomi, politik atau keamanan. Komentar Saefuddin (2001) terhadap kebijaksanaan Otonomi Daerah UU no. 22/1999 mendemonstrasikan bahwa sebagian besar kritik yang ditujukan kepada UU ini berfokus pada anggaran dan fasilitas fisik. Menurut Saefuddin justru hakikat dasar otonomi daerah, yakni berotonomi berarti mengembangkan budaya demokrasi hampir tidak pernah disinggung baik oleh penyusun kebijaksanaan sendiri ataupun oleh para pengertik kebijaksanaan ini. Demikianlah isu otonomi sebagai issue kebudayaan tidak pernah diperhatikan. Kembali ini merefleksikan posisi dan peran antropologi dalam perkembangan kebijakan pemerintah.

### ***Hadirin sekalian yang saya muliakan,***

Sementara kutipan diatas membawa kita pada keprihatinan terhadap kesadaran dan keperdulian pada peran antropologi, salah seorang antropolog Indonesia dalam pidato pengukuhan nya malah lebih membawa kita pada keprihatinan terhadap peran dari disiplin ilmu sosial ini. Terkesan dengan pengalaman pribadi seorang antropolog besar dari Columbia University, Prof. Morton H. Fried, yang disesali oleh ibunya ketika dia memilih untuk kuliah di jurusan antropologi : " .... an anthropologist? What was that? One thing was sure. You could not make a living at it." (Fried, 1972:4), Marzali menulis:

"Masalah yang nyata menghadang di depan mata para mahasiswa terutama adalah masalah perut, masalah karir, masalah masa depan diri dan seterusnya. .... Sehubungan dengan hal itu, kembali saya pertanyakan, apa yang bisa diperbuat dengan keahlian dalam bidang antropologi untuk mengisi perut, untuk meningkatkan karir, dan menjamin masa depan yang cerah bagi diri lulusannya? Baik ketika saya masuk pada tahun 1962 sampai ke masa saya sudah menjadi profesor tahun 2002 sekarang ini, jawabannya masih sama yaitu : "tidak meyakinkan." (Marzali, 2002:2).

Saya tidak tahu bagaimana jawaban rekan-rekan antropologi berdasarkan pengalamannya dalam menanggapi pesimisme masa depan para antropolog yang dikemukakan oleh Marzali diatas. Tetapi, apakah peran yang tidak meyakinkan

menurut Marzali ini merupakan jawaban situasi diatas? Menyebabkan antropolog tampak tak berperan dalam krisis-krisis negara? Tampaknya situasi ini bahkan bertentangan dengan opini orang awam mengenai peran antropologi untuk Indonesia dewasa ini, seperti tampak pada sebuah diskusi di Jakarta. Jika pra reformasi para pengusaha ini tidak ada masalah sehubungan dengan masalah etnis, maka kini mereka dihadapi rasa takut mencekam karena aksi kelompok-kelompok etnik. Demikianlah mereka mengundang para ahli ilmu sosial untuk mengatasi masalah ini. Menarik mengutip komentar salah seorang peserta: "Kami dulu amat tidak peduli dengan antropologi dan bahkan ilmu-ilmu sosial. Mereka mendapatkan ruangan kecil jauh di belakang gedung. Ternyata kami salah ....." Kalau begitu para konsumen baru saja menyadari kebutuhan akan peran ilmu-ilmu seperti antropologi. Disinilah letak masalahnya. Walaupun demikian ketika kebutuhan dan kesadaran konsumen muncul, peran disiplin inipun masih jauh dari yang diharapkan sehingga ditengah situasi yang membutuhkan, tokoh-tokoh antropologi terkesan absen dalam perannya.

Kalau pernyataan Marzali lebih terfokus pada tingkat mikro seperti peran antropologi dalam masalah perut, karir dan masa depan seseorang, maka pengalaman pengusaha kayu menekankan peran antropologi pada tingkat makro. Walaupun Marzali kelihatan pesimis akan masa depan antropologi, tetapi dia mengembangkan argumentasi bagaimana pentingnya antropologi, lebih tepatnya antropologi terapan dalam mengangkat derajat bangsa. Demikianlah Marzali mengembangkan argumentasi peran antropologi pada tingkat makro. Menurut hemat kami peran antropologi pada tingkat makro di sebuah negara adalah bagaimana hubungan antara peran negara dengan wilayah jelajah

antropologi, yang merupakan satu-satunya disiplin ilmu yang paling tua dan paling intens dalam menggeluti masalah kebudayaan dan masalah etnis. Dengan demikian wilayah antropologi adalah membantu peran negara dalam masalah etnik dan masalah kebudayaan, tetapi juga bagaimana negara menempatkan antropologi sehingga disiplin ini dapat menjalankan perannya, seperti yang diungkapkan Marzali (2000:103) misalnya yang melihat sumbangsih antropologi dalam arti aktualisasi budaya dalam konteks pembangunan yang dilakukan pemerintah.

### **Masalah Etnik dan kebudayaan**

Diversitas etnik di Indonesia pernah dan sering merupakan kebanggaan bangsa Indonesia baik bagi tokoh politik, tokoh budaya, orang awam tanpa pernah ada yang menghawatirkan masalah yang ditimbulkan oleh diversitas ini. Malah pemerintah mencoba meredam kemungkinan eksek dari diversitas etnik seperti misalnya kebijakan pemerintah dalam sensus yang tidak pernah menggali informasi mengenai identitas etnik. Padahal sensus tahun 1930 menyajikan informasi yang amat kaya tentang etnis di Indonesia. Walaupun para ahli ilmu sosial sering mengumandangkan keluhan akan situasi ini, namun tampaknya keluhan ini tidak mendapat tanggapan dari pemerintah seperti tampak pada absennya data suku-bangsa pada sensus 1961, sensus 1971, sensus 1980 dan sensus 1990. Namun, tiba-tiba saja sensus tahun 2000 menyajikan data mengenai komposisi dan distribusi kelompok etnik di Indonesia. Apakah peristiwa-peristiwa pasca reformasi yang marak diwarnai peristiwa kebangkitan etnis merupakan pemicu peralihan kebijaksanaan pemerintah dalam penyajian data etnis untuk sensus? Apakah pemerintah telah

merubah kebijaksanaannya dengan tidak lagi melihat masalah etnis sebagai masalah ancaman, tetapi merupakan suatu anugrah yang potensial, potensial untuk konflik, potensial untuk diberdayakan, potensial untuk pembangunan dan seterusnya. Atau mungkin juga pemerintah amat menyadari bahwa masalah diversitas etnis dapat menjadi berbahaya dengan kebijaksanaan politik burung unta, tetapi ancaman masalah etnis harus diungkapkan secara terbuka. Tampaknya berbagai musibah terkait etnis yang melanda Indonesia telah membangkitkan keperdulian bangsa ini terhadap anugrah yang telah berbalik menjadi musibah. Simposium Antropologi di Padang tahun 2002 melihat kemajemukan budaya sebagai kekayaan bangsa Indonesia yang ternyata mengalami 'keterpinggiran' dan bahkan 'keterpurukan' dalam wilayahnya sendiri selama tiga decade terakhir (Jurnal AntropologiXXIV, NO 61 : iii). Merupakan hal yang amat ironis dimana potensi kekayaan bangsa justru telah berubah menjadi sumber konflik dan perseteruan diantara anak bangsa, dan situasi ini telah menjadi sumber inspirasi diselenggarakannya Simposium Antropologi di Makasar pada tahun 2000, di Padang pada tahun 2001 dan di Bali pada tahun 2002, yang semua temanya berkaitan dengan konflik yang berakar pada diversitas etnik dan kebudayaan di Indonesia.

### ***Para hadirin sekalian***

Masalah diversitas etnik bukanlah cuma masalah dalam arti kuantitatif seperti masalah frekwensi dan distribusi kelompok-kelompok etnis, tetapi masalah diversitas etnik justru lebih merupakan masalah kualitatif seperti masalah batasan kelompok etnis, interpretasi etnis, fungsi etnis, manipulasi etnis, dinamika etnis, rekayasa etnis dan seterusnya. Judul-judul tulisan seperti

"Ethnic boundaries" (Barth, 1970); "Who is Malay" (Othman, 1979); "Who is Indian (Mearns, 1986)"; "Siapakah orang Betawi"? (Shahab, 1995), serta pembahasan yang mempertanyakan batasan etnik Greek (Trudgill, 1977), batasan etnik Indian (Roosens, 1989), batasan etnik Karen (Keyes, 1981) merupakan refleksi dari masalah batasan kelompok etnis.<sup>1</sup> Tulisan ini tidak dimaksudkan untuk membahas kerumitan batasan etnis. Data ini hanya memberikan kenyataan diversitas etnis yang besar berarti juga diversitas kebudayaan. Seperti juga diversitas etnik, maka diversitas kebudayaan bukan berarti frekwensi dan ragam kebudayaan tapi permasalahan kualitatif dari diversitas kebudayaan. Tidak mudah bila bicara kebudayaan kita harus menyederhanakan konsep kebudayaan. Saya kurang sependapat dengan Marzali yang menyatakan bahwa rekan-rekan antropologi terlalu bermain pada tataran teoritis dan ini menghambat peran antropologi (Marzali, 2002). Menurut hemat kami membedah konsep kebudayaan bukan berarti mempersulit, justru sebaliknya dengan membedahnya, membuat konsep ini menjadi jelas dan menjadi lebih mudah untuk diimplementasikan untuk menentukan dalam batasan mana dialog digelar dan bukan berarti membatasi lingkup dialog.

### **Peran Negara Dalam Kebudayaan**

Salah satu masalah kebudayaan adalah wacana mengenai transmisi kebudayaan yang masalahnya menjadi lebih kompleks pada masyarakat multikultural. Pada tataran negara wacana ini

---

<sup>1</sup> Ketika pemilihan Gubernur Jakarta periode 2002-2007, BAMUS BETAWI menyelenggarakan macam-macam rapat kerja, lokakarya, seminar dan sebagainya yang antara lain menentukan batasan kebetawian. Salah satu pemicu kegiatan adalah adanya seorang calon yang menyebut dirinya orang Betawi padahal tidak dipandang demikian oleh orang Betawi.

berarti dimana tepatnya negara menempatkan peran transmisi kebudayaan dalam perjalanan bangsa ini. Konsep transmisi yang berarti bagaimana kebudayaan disosialisasikan mengandung aspek pendidikan, bahwa kebudayaan disosialisasikan kepada anggotanya dengan cara mendidik anggotanya, baik formal maupun tidak formal. Mungkin pemikiran inilah yang dahulu menginspirasi para bapak bangsa di negara ini untuk menempatkan institusi yang menangani masalah-masalah kebudayaan bersamaan dengan institusi yang menangani masalah-masalah pendidikan. Demikianlah kebudayaan diletakkan dalam departemen yang sama dengan pendidikan, yaitu Departemen Pendidikan dan Kebudayaan. Tetapi kini penanganan masalah-masalah kebudayaan telah berpindah dari Departemen Pendidikan ke Departemen Kebudayaan dan Pariwisata. Dengan disandingkannya kebudayaan dengan pariwisata, maka sulit untuk dihindari bahwa konsep kebudayaan cenderung mengalami penyempitan arti. Pada posisi ini penekanan arti kebudayaan cenderung lebih diterjemahkan sebagai komoditas dan bukan lagi sebagai sistem kognitif, sistem evaluatif dan simbolis. Penekanan pada komoditisasi kemudian menyebabkan representasi kebudayaan terfokus pada produk dari sistem ide dan pengetahuan tersebut. Rasa-rasanya interpretasi ini tidak terlalu jauh dari kenyataan dimana kita lihat sekarang bagaimana kebudayaan diberlakukan sebagai obyek komoditas untuk laku dijual sebagai sumber devisa.

Bukan saja pemfokusan arti kebudayaan yang menggeser, bahkan dalam prakteknya terungkap bahwa kebudayaan merupakan suatu sistem. Bila situasinya seperti ini maka dapat dibayangkan betapa mengerikan situasi yang akan menanti dimuka kita. Kebudayaan yang merupakan tataran ide

sebagai pedoman bertingkahtaku telah berubah sebagai komoditas sumber devisa yang terlepas dari sistim.<sup>2</sup> Dalam konteks ini maka strategi kebudayaan adalah strategi komoditas, bagaimana kehendak konsumen dan tidak lagi memperhitungkan bagaimana posisi pemilik kebudayaan. Yang paling krusial bila terjadi konflik antara kepentingan peran kebudayaan bagi si pemilik sebagai tataran ide dengan kepentingan peran kebudayaan sebagai komoditas, maka biasanya yang akan dipilih adalah kepentingan peran kebudayaan sebagai komoditas karena posisi kebudayaan yang diletakkan dalam struktur pengembangan devisa. Permasalahannya disini bahwa yang berperan besar dalam proses komoditisasi kebudayaan ini bukan hanya pemerintah, tetapi justru peran ini lebih besar berada pada lembaga-lembaga non pemerintah serta individu. Lalu bagaimana posisi peran kebudayaan sebagai sistim kognitif? Akan dibawa kemana peran kebudayaan? Akan menjadi apa kelompok masyarakat yang nilai-nilainya telah diubah sebagai komoditas, diubah bukan oleh pemiliknya tetapi oleh mereka yang bertanggungjawab untuk mendatangkan keuntungan materi yang sebesar-besarnya. Inilah salah satu tantangan yang sedang dihadapi negara dan bangsa Indonesia.

Tulisan Jean-Marc de Grave (2002) mengenai "Transmisi Pengetahuan dan Nilai Budaya Masyarakat Indonesia Ditinjau dari Ajaran *Kanuragan* Jawa" mendeskripsikan perubahan dalam transmisi pengetahuan lokal, dari sistim tradisional ke sistim moderen. Dalam sistim tradisional transmisi *kanuragan* disampaikan secara oral dan merupakan pusat dari peran dalam hubungan sosial serta dilakukan dalam interpretasi kosmos. Dengan sistim transmisi modern yang ditangani oleh lembaga

---

<sup>2</sup> Debat Undang-Undang Anti Pornografi dan Porno Aksi merefleksikan argumentasi ini.

komersial berakar pada sistim dari dunia barat, maka transmisi pengetahuan ini telah dicabut dari tranmisi moral dan berpengaruh pada bentuk tingkah anggota masyarakat ini. Dalam sistim pergaulan masyarakat tradisional, seseorang selalu menemukan suatu usaha untuk hidup seimbang dalam dimensi ruang dan waktu lokal, sebagai ungkapan dari ruang dan waktu kosmik yang bersifat universal. Sedangkan dalam sistim pergaulan individualistik moderen, sifat universalnya telah dianggap sebagai dasar dari semua kegiatan. Sifat tersebut mengancam semua aktifitas yang bersifat lokal tanpa mengakui sifat perusakanya. Demikianlah sebuah contoh ketika transmisi lokal diambil oleh lembaga komersial karena obyek pengetahuan ini lebih dilihat sebagai komoditas ketimbang sebagai sistim pengetahuan suatu kelompok yang berada dalam keseluruhan sistim pengetahuan kelompok tersebut.

Masalah komoditisasi kebudayaan bukanlah cuma terjadi di Indonesia, tetapi komoditisasi kebudayaan telah terjadi hampir di semua tempat di muka bumi ini. Proses globalisasi, kemajuan teknologi tidak dapat membendung meluasnya gejala komoditisasi kebudayaan. Namun ini bukan berarti kita harus menerima begitu saja gejala ini. Justru kalau gejala ini telah terjadi di banyak tempat di muka bumi, kita seharusnya mengambil pelajaran dari gejala ini. De Grave bahkan menulis bahwa negara-negara yang dianggap berkembang (dari sudut ekonomis), tetapi dari aspek lainnya ternyata jauh lebih berkembang daripada negara-negara industri, mempunyai tanggungjawab yang amat penting dalam hal globalisasi. Mereka mempunyai hak untuk menolak kesombongan dari negara-negara yang memaksakan globalisasi melalui penanaman ideologinya (2002:81). Pertanyaannya kini sejauh

manakah keperdulian dan peran lembaga-lembaga negara kita untuk menempatkan posisinya sebagai yang dihimbau de Grave.

### ***Hadirin yang saya muliakan***

Menurut hemat kami kebudayaan berkembang menjadi komoditas merupakan hal yang tidak dapat dielakkan. Bukan cuma kebudayaan, bahkan yang lebih tinggi dari kebudayaan, seperti agama, juga sering dijadikan komoditas oleh pihak tertentu. Jadi kita tidak perlu dan tidak mungkin menolak proses komoditisasi kebudayaan. Tapi juga harus disadari kebudayaan adalah nilai-nilai yang amat berperan dalam kehidupan manusia yang menjadi pengetahuan mereka yang pada gilirannya merupakan pedoman hidup seseorang. Masalahnya adalah bagaimana mempertemukan kebudayaan sebagai komoditas dengan kebudayaan sebagai sumber nilai kehidupan bermasyarakat dalam hubungan yang harmonis. Jelas pada tingkat makro ini merupakan tugas negara. Tugas negara untuk menempatkan kebudayaan dalam departemen yang tepat dan membentuk hubungan fungsi yang harmonis dari kebudayaan karena kebudayaan bersifat multifungsi.

Dengan diletakkannya kebudayaan dalam Departemen Pariwisata memang pemerintah lebih melihat kebudayaan sebagai kebudayaan materi. Padahal masalah yang paling berat dari kebudayaan adalah justru kebudayaan non materi. Memang benar Departemen Kebudayaan dan Pariwisata juga memberi perhatian pada kebudayaan non-materi, namun dalam prakteknya sentuhan hanya dilakukan terhadap kebudayaan materi karena aspek inilah yang dapat dengan mudah dijadikan komoditas. Kebutuhan akan devisa dalam jumlah sebesar-besarnya dan dalam waktu

sesingkat-singkatnya menyebabkan tanggungjawab akan kebudayaan sebagai sistim nilai menjadi tersisihkan. Kalaupun kemudian aspek non-materi diperhatikan, maka perhatian yang diberikan ini dalam kaitan penggalakan kebudayaan materi sehingga fokusnya bukan dalam sistim kebudayaan non materi, tetapi dalam hubungan dua arah kebudayaan materi dan kebudayaan non materi.

Dalam ilmu antropologi terdapat dua aliran besar dalam pendefinisian konsep kebudayaan yaitu aliran behavioral dan ideational. Penggabungan kedua pendekatan ini membuat kebudayaan bicara mengenai way of life dan sistim ide dari anggota masyarakat suatu bangsa. Dengan demikian peran negara dalam kebudayaan adalah dalam pembentukan way of life dan sistim ide dari bangsanya. Bukan saja proses komoditisasi kebudayaan yang menyebabkan tersisihnya perhatian pemerintah pada aspek non materi dari kebudayaan, tetapi rendahnya kesadaran atau dangkalnya pengetahuan mengenai kebudayaan dari pihak terkait seperti yang dikeluhkan Fedyani (2001) yang amat prihatin bahwa kebudayaan demokrasi samasekali tidak disinggung dalam Undang Undang Otonomi daerah walaupun sebenarnya inilah yang merupakan hakekat dasar otonomi daerah yaitu mengembangkan budaya demokrasi.

:"...para perancang, penyusun dan pendiskusi rancangan UU tersebut masih terpaku pada persoalan materi yang konkrit, yang sangat terkait dengan kepentingan-kepentingan jangka pendek. Aspek kebudayaan yang merupakan landasan penting dalam upaya menjadikan demokrasi sebagai pengetahuan dan keyakinan

(yang berjangka panjang) tidak disinggung sama sekali. Barangkali hal ini disebabkan dangkalnya pengetahuan dan wawasan para perancang, penyusun dan pendiskusi UU itu” (Fedyani. 2001:5).

Melani yang juga amat prihatin akan posisi kebudayaan dalam kebijaksanaan pemerintah berpendapat bahwa dalam era yang penuh kontradiksi ini kebudayaan dianggap sebagai penanda yang menentukan tetapi konsep kebudayaan yang diacu oleh para politisi dan penentu kebijakan adalah konsep kebudayaan yang bersifat reduktif, essensialis dan stereotipis (2005: 73-74). Namun lembaga apakah dari struktur pemerintahan kita yang pantas dan tepat untuk diberikan tanggungjawab untuk menangani masalah-masalah kebudayaan? Ketika kebudayaan ada di bawah naungan Departemen Pendidikan dan Kebudayaan tampaknya lebih tepat ketimbang letaknya dibawah Departemen Kebudayaan dan Pariwisata. Sebenarnya pertimbangan dan kesadaran mengenai permasalahan dari kebudayaan ini merupakan titik tolak penentuan lembaga pemerintahan yang mana yang sebenarnya patut bertanggungjawab atas permasalahan kebudayaan. Yang pasti permasalahan kebudayaan tidak lebih kecil bila dibandingkan dengan permasalahan ekonomi dan politik sehingga wajar saja lembaga pemerintahan yang harus menangani ini juga layak nya diberikan seperti adanya lembaga-lembaga pemerintahan yang menangani masalah politik dan ekonomi, atau, masalah kebudayaan tidak akan tersentuh secara proporsional.

:”Apabila kita mencermati UU N0.22/1999 mengenai Otonomi Daerah, sukar sekali bagi kita untuk menemukan unsur mana dari UU tersebut

yang mengarah pada pencapaian budaya demokrasi. Potensi inovasi budaya demokratis menyimpang karena ketidakjelasan, baik implisit maupun eksplisit, sehingga mengundang interpretasi yang bermacam-macam. Mengingat ketidakjelasan ini, maka patut diragukan manfaat undang-undang ini terhadap pengembangan budaya demokrasi yang pada hakikatnya merupakan hal yang paling mendasar dalam tujuan otonomi." (Fedyani,2002

Khawatiran Fedyani termaterialisasikan dalam berita Kompas (Jumat, 3 Maret 2006 halaman2 kolom 5 s/d7) "Kultur Demokrasi Belum Terbangun" yang menanggapi maraknya aksi buruh terhadap perusahaan-perusahaan seperti kasus Freeport dan Maspion serta aksi mahasiswa yang berakhir dengan bentrokan disebabkan belum terbentuknya kultur demokrasi. Hotman, sosiolog dari Universitas Erlangga yang mengomentari masalah ini, berpendapat bahwa dalam situasi ini tidak muncul diskursus demokrasi, bahkan yang muncul adalah kekeliruan dalam proses pembangunan demokrasi. Hotman melihat usaha pemerintah baru dipermukaan. Tampaknya komentar Hotman merupakan refleksi dari kritik Saefuddin akan kelemahan isu demokrasi dari UU tersebut diatas. Mungkin keluhan-keluhan seperti yang dikemukakan ini tidak muncul bila ada lembaga yang khusus menangani masalah-masalah kebudayaan secara profesional dalam struktur pemerintahan.

## Situasi Antropologi di Indonesia

Masalah yang menarik dari situasi di Indonesia dalam konteks posisi antropologi di Indonesia adalah, pertama Indonesia merupakan suatu negara multikultural; kedua, ketika ada permasalahan yang amat berkaitan dengan anekawarna kebudayaan ini, wajah antropolog tidak menghiasi media sebagai selebritis akademis. Kalau masalah transmisi kebudayaan berkaitan erat dengan masalah pendidikan, apa sebenarnya yang sedang terjadi dalam dunia pendidikan antropologi di Indonesia? Mengetahui dan menggali situasi pendidikan antropologi sebenarnya kita menyentuh masalah produsen antropologi. Untuk mengerti situasi ini baiklah kita tinjau pabrik antropologi, yaitu program-program antropologi di universitas-universitas yang ada di Indonesia. Tidak ada universitas swasta yang membuka program antropologi. Program ini hanya terdapat di universitas negeri. Hanya sejumlah kecil dari sejumlah besar universitas negeri yang ada di Indonesia yang membuka program antropologi. Hanya beberapa diantaranya yang membuka program pasca-sarjana. Bandingkan ini dengan persebaran fakultas ekonomi serta fakultas ilmu politik, baik pada universitas swasta maupun universitas negeri. Gambaran ini bukan saja merefleksikan keterbatasan kemampuan masyarakat kita memproduksi ahli antropologi, tetapi juga merefleksikan sejauh mana kesadaran masyarakat kita mengenai kebutuhan akan antropologi. Keperdulian ini menjadi lebih jelas bila kita tinjau jumlah serta trend mahasiswa dari program-program tersebut diatas. Ketika Aceh dilanda masalah separasi dan tsunami, para pelaku didalamnya merasa kekurangan pengetahuan mengenai orang dan budaya Aceh. Tetapi ketika Universitas Syah Kuala membuka Fakultas Ilmu-ilmu Sosial, maka dari empat program yang dibuka

---

ternyata antropologi tidak terdapat didalam keempat program tersebut. Kalaupun kita mampu memproduksi antropolog, tetapi kalau kesadaran masyarakat akan kebutuhan tenaga ini rendah, maka yang akan terjadi adalah apa yang di khawatirkan Marzali dalam pidato pengukuhan nya tersebut diatas.

Sekarang bagaimana dengan sistim pendidikan antropologi di Indonesia, khususnya antropologi di Universitas Indonesia sehubungan dengan kebutuhan yang muncul dalam masyarakat? Setelah antropologi di Universitas Indonesia berumur lebih dari limapuluh tahun, praktis hampir tidak ada dari produk lembaga ini yang menspesialisasikan dirinya pada wilayah tertentu ataupun menspesialisasikan diri pada etnik tertentu. Ini amat berbeda dengan situasi antropologi di luar Indonesia dimana para ahli antropologinya menspesialisasikan diri bukan hanya pada bidang studi tertentu, tetapi juga menspesialisasikan dirinya pada wilayah atau etnik tertentu. Demikianlah setiap orang menspesialisasikan dirinya sebagai ahli etnik tertentu. Ketika seseorang menjadi ahli etnik tertentu, bukan saja dia menguasai pengetahuan mengenai etnik tersebut, tetapi juga dia menguasai bahasanya serta mempunyai jaringan dalam masyarakat termasuk tokoh-tokohnya baik tokoh formal maupun tokoh informal sehingga pengaruh dan wibawanya dapat diandalkan. Margaret Mead misalnya jauh lebih dikenal dan didengar oleh penduduk di Samoa ketimbang pimpinan formal di daerah tersebut. Hal yang sama terjadi pada Snouck Hurgronje pada masa pemerintahan kolonial Belanda di Indonesia dimana Snouck Hurgronje amat dikenal dan amat dipercaya oleh rakyat Gayo ketimbang pemerintah jajahan Belanda. Pengetahuan Snouck Hurgronje mengenai hukum adat di Aceh serta pengetahuannya mengenai Islam memposisikan dia sebagai orang yang amat dekat dan amat mengerti mengenai

masyarakat lokal. Berdasarkan konsentrasi pengetahuannya serta perannya dalam menjalankan pengetahuan tersebut, antropolog sebenarnya dapat menjadi narasumber serta jembatan pihak luar dengan kelompok tertentu.

### ***Hadirin yang saya hormati***

Situasi hubungan antar etnis di Indonesia pasca reformasi jelas menolak kepercayaan lama bahwa masalah etnis adalah masalah tradisional yang akan terselesaikan dengan sendirinya dalam modernisasi. Bahkan globalisasi dan berkembangnya komunikasi bukan menghilangkan permasalahan terkait kelompok etnis, tetapi justru proses ini telah melahirkan masalah baru yang terefleksikan dengan berkembangnya fokus baru dalam studi antropologi yang dikenal dengan *ethnospace*. Studi *ethnospace* ini menunjukkan bahwa masalah etnis tidak akan pernah berhenti karena permasalahannya akan terus bergeser seiring perubahan yang terjadi pada satu kelompok masyarakat (Ermansyah, 2005). Dengan demikian permasalahan etnis ini berkembang menjadi tiga fokus yaitu studi terfokus pada permasalahan kelompok etnis di daerah asalnya; studi terfokus kelompok etnis yang terlepas dari ruang sebagai akibat mobilitas ruang serta studi etnis terfokus pada pertemuan kelompok yang menjadi amat dominan dalam proses globalisasi dan melesatnya komunikasi. Ketiga fokus studi ini merupakan masalah-masalah yang dihadapi pemerintah Indonesia saat ini.

Ketika Indonesia dilanda masalah kerusuhan etnik baik di Kalimantan, Ambon maupun Poso, Departemen Antropologi Universitas Indonesia selalu gagal memenuhi permintaan media menyediakan antropolog yang dapat diwawancarai. Hal yang sama

terjadi ketika tsunami melanda Aceh. Ketika Ketua Departemen mencoba menghubungi beberapa orang yang pernah melakukan penelitian di daerah ini selalu saja mereka merasa bahwa mereka tidak representatif karena mereka tidak menguasainya. Akibatnya hanya ada satu dua orang yang selalu muncul sehingga masyarakat tidak pernah mendapatkan gambaran yang komperhensif karena tidak terdapat debat wacana seperti halnya ketika para ekonom dan para politisi membahas tuntas masalah.

Apa sebenarnya yang telah terjadi hingga para antropolog ini tidak membentuk dirinya menjadi ahli dalam etnik tertentu?<sup>3</sup> Ada kesan bahwa selama ini memang tidak pernah tampak adanya program ataupun usaha dari program antropologi untuk menspesialisasikan produk mereka menjadi ahli wilayah tertentu. Produk lembaga ini yang jumlahnya relatif kecil dibandingkan kekayaan distribusi etnik serta variasi dan jumlah masalah yang harus ditangani menyebabkan produk ini begitu saja terserap pasar sebelum mereka sempat menspesialisasikan diri mereka. Demikianlah produk ini terus dipakai pasar hingga masa mereka habis dimakan waktu. Tanpa kesadaran dan perencanaan maka situasi ini akan terus berjalan, padahal begitu banyak antropolog asing yang telah menjadi ahli etnik tertentu di Indonesia. Contoh klasik misalnya Snouck Hurgronje yang namanya tidak dapat dipisahkan dari Aceh; van der Plass dan van den Berg yang menguasai pengetahuan Arab di Indonesia; C. Geertz dan H. Geertz ahli tentang Jawa; James Fox spesialis Sawu; E. Bruner yang amat ahli mengenai masyarakat Batak; Huub de Jong yang amat menguasai pengetahuan tentang masyarakat Madura;

---

<sup>3</sup> Hal ini terutama berlaku untuk para antropolog UI. Program antropologi di daerah ada kecenderungan konsentrasi pada wilayah namun agak terbatas pada wilayah domisili mereka.

Freeman, antropolog yang ahli mengenai Dayak Iban; Wyn Sargent yang amat menguasai tentang suku Dani. Mereka bukan saja menguasai masyarakat dan kebudayaan terkait, tetapi juga berbicara dalam bahasa tersebut dengan fasih serta mempunyai jaringan serta pengaruh didalamnya. Nama-nama ini merupakan antropolog kaliber internasional. Salah seorang antropolog berdarah Indonesia yang kawin dengan orang Australia, belajar antropologi dan kemudian bekerja di sebuah universitas di negeri kanguru ini telah menspesialisasikan dirinya pada salah satu etnik di pulau Sumbawa. Dalam proses penelitiannya beliau diangkat anak dengan upacara adat serta diberikan nama Sumbawa (Gunawan, I, 2000). Demikianlah akrabnya seorang antropolog dengan masyarakat yang ditelitinya. Tokoh-tokoh masyarakat di daerah penelitian mereka, tokoh formal dan informal, merupakan jaringan pertemanan para antropolog tersebut. Ketika Departemen Antropologi mengadakan Simposium I, II dan III yang topiknya membahas masalah-masalah nasional bersumber pada masalah etnik, tampak bahwa mereka yang menyajikan makalah berdasarkan penelitian mereka umumnya para peneliti luar. Para penulis Indonesia tidak terfokus pada etnik tertentu yang menunjukkan keahlian mereka mengenai etnik tersebut. Ahli-ahli antropologi Amerika, Inggris, Amerika rata-rata merupakan ahli wilayah. Bahkan Jepang telah merambah dunia pemukiman di luar Jepang. Ahli antropologi Jepang belajar di Inggris serta mendalami bahasa Arab di negeri ini dalam rangka persiapan sebagai peneliti di Syria, Sudan dan sebagainya; antropolog Jepang lainnya belajar bahasa Indonesia sebagai persiapan menjadi Indonesianis. Melihat kebutuhan yang ada di lapangan serta peran antropologi dalam jelajah etnik dan budaya, sudah waktunya antropologi di Indonesia memprodukan tenaga ahli wilayah

---

## ***Hadirin yang saya muliakan***

Yang lebih menarik lagi adalah bila kita bicara masalah pendidikan antropologi di sekolah yang merupakan tahap awal pada pendidikan formal dimana antropologi diberikan. Apa yang terjadi disini? Menurut hemat kami seharusnya antropologi diberikan sejak masa kanak-kanak. Dengan demikian sejak dini anggota masyarakat ditanamkan kesadaran akan aneka warna masyarakat di bumi tempat dia berpijak. Setelah memiliki pengetahuan mereka juga dilatih mengerti, memahami sehingga muncul toleransi dalam proses interaksi. Namun nyatanya mata pelajaran ini hanya pernah diberikan pada tingkat SMU. Ada lagi yang lebih menarik. Apakah itu? Setelah masa reformasi mata pelajaran antropologi dihapuskan sehingga hanya tinggal matapelajaran sosiologi. Bagaimana mungkin, pelajaran mengenai aneka warna masyarakat dan kebudayaan dihapuskan dalam sebuah negara dengan penduduk yang amat beranekawarna dalam etnis dan kebudayaannya. Hal yang paling menyedihkan penghapusan mata pelajaran antropologi pada Sekolah Menengah terjadi justru pada saat Indonesia dilanda duka nestapa yang amat berkaitan masalahnya dengan diversitas etnik di negara ini. Dulupun ketika antropologi diberikan pada sekolah lanjutan, praktis hampir seluruh pengajarnya tidak berlatarbelakang pendidikan antropologi. Data kuantitatif yang kami peroleh dalam Latihan Antropologi bagi Pengajar SMU di Jakarta yang diselenggarakan oleh Departemen Antropologi FISIP UI pada tahun 1997 dan 1998 menunjukkan hanya seorang pengajar yang mempunyai latar belakang pendidikan sejarah, selebihnya berasal dari disiplin bahasa seperti sastra Perancis, Sastra Jerman, Sastra Indonesia dan seterusnya bahkan ada yang latar pendidikannya Sekolah Olahraga. Gambaran ini merefleksikan bahwa perhatian

praktis tidak diberikan pada wilayah kebudayaan dan etnik dalam bidang pendidikan, walaupun pada waktu itu keduanya berada dibawah satu atap dalam struktur pemerintahan, yaitu atap Departemen Pendidikan dan Kebudayaan.

Sudah waktunya pemerintah kita memberikan perhatian pada dunia pendidikan antropologi bukan saja di tingkat SMU, tetapi seharusnya dimulai pada tingkat yang paling dini, bahkan dimulai pada tingkat pra SD. Tentu saja pendidikan ini tidak dalam bentuk mata pelajaran, akan tetapi dalam bentuk praktek yang amat disenangi anak-anak. Sistem yang telah dilakukan di negara Inggris misalnya amat menarik untuk ditiru. Sekolah-sekolah di London dengan muris-muridnya yang berlatarbelakang multikultural telah disosialisasikan sejak dini akan multikultural masyarakat dimana mereka tumbuh dan berkembang. Pada hari-hari tertentu para murid diminta menyanyikan lagu atau memainkan alat musik negeri mereka berasal. Mereka juga diminta untuk mengenakan busana etnik mereka. Ada waktu-waktu dimana disediakan aneka warna boga dari berbagai etnik. Anak-anak ini juga dilatih bercerita tentang kehidupan kelompok etnik mereka. Dibawakan oleh anak-anak dalam dunia anak-anak menyebabkan mata pelajaran antropologi ini amat diminati dan dengan mudah diserap oleh para murid. Peran guru tentunya untuk menanamkan rasa sadar dan toleransi dari anak didik multikultural ini. Kalau para pendidik masalah-masalah antropologi bukanlah ahli antropologi artinya jumlah pendidik ini masih jauh dari memadai. Suatu hal yang tidak dapat disalahkan bila produk dari pelajaran antropologi ini juga menjadi jauh panggang dari api, sehingga dibutuhkan satu usaha untuk memproduksi ahli antropologi yang sesuai dengan kebutuhan pasar yang beragam.

## Multikulturalisme – Masalah Diversitas Kebudayaan di Indonesia

Salah satu permasalahan sehubungan dengan kebudayaan di Indonesia yang sering diangkat akhir-akhir ini adalah masalah masyarakat multikultural. Kesulitan dalam bicara konsep-konsep kebudayaan adalah konsep-konsep tersebut sering digunakan dalam kehidupan sehari-hari oleh semua orang, sehingga istilah-istilah tersebut lebih merupakan konsep populer ketimbang konsep akademik. Bikhu Parekh (1997) menyarankan bahwa multikulturalism mengandung tiga unsur yaitu, sesuatu yang ada hubungan dengan kebudayaan; kedua, menunjuk pada pluralisme kebudayaan dan ketiga, menunjuk pada cara khas merespon pluralisme tersebut. Artinya bicara multikulturalism menurut Parekh adalah bicara cara merespon pada pluralisme kebudayaan. Watson (2000:1) menyatakan mereka yang bicara masyarakat multikultural menunjuk pada kelompok-kelompok dengan bahasa yang sama, sejarah yang sama, kepercayaan bersama, nilai bersama, dan daerah asal yang sama, yang keseluruhannya milik suatu kelompok. Sekurang-kurangnya ide inilah yang ada di kepala mereka yang bicara masyarakat multikultural. Akhiran isme menunjuk pada ideologi yang ada dipikiran orang dalam kehidupan sehari-hari. Dalam konteks ini bicara multikulturalisme berarti bicara bagaimana respons masyarakat dengan aneka ragam kelompok dimana masing-masing kelompok tersebut berasal dari daerah yang sama, memiliki bahasa yang sama, sejarah yang sama, kepercayaan bersama, nilai bersama.

Ada tiga macam diversitas kebudayaan dalam dunia moderen (Parekh,1997), pertama, yang dinamakan *subcultural*

*diversity* yang merujuk pada kelompok orang yang walaupun anggota-anggotanya secara bersama menyandang kebudayaan yang sama, sebagian dari mereka memiliki dan menjalankan kepercayaan yang berbeda dalam beberapa aspek kehidupan atau mengembangkan cara hidup yang berbeda untuk kelompok mereka. Kedua, *perspectival diversity* yaitu beberapa anggota sangat kritis terhadap prinsip atau nilai-nilai yang ada dalam kebudayaan mereka dan mencari untuk membentuk kembali dalam jalur yang benar. Misalnya gerakan feminis yang menyerang bias patriarchy. Ketiga, *communal diversity* dimana masyarakat moderen juga melingkupi beberapa self-consciousness dan komunitas yang terorganisir dengan baik yang hidup dengan sistem kepercayaan dan praktek yang berbeda. Mereka terdiri dari imigran yang baru datang atau yang telah mapan atau komunitas agama dan kelompok kebudayaan yang terkonsentrasi disatu wilayah misalnya penduduk asli. Meskipun ketiga bentuk diversitas kebudayaan ini memiliki beberapa unsur kebudayaan secara bersama dan kadang-kadang dalam praktek saling tumpang tindih, mereka berbeda dalam beberapa hal. Kelompok pertama, sub-cultural diversity sering bereaksi keras namun tantangannya agak terbatas lingkupnya. *Perspectival diversity* lebih radikal sehingga sering menolak kebudayaan dominan atau menerimanya dalam teori namun menolak untuk mempraktekannya. *Communal diversity* agak sulit untuk akomodasi tergantung pada tuntutan mereka.

Pada kenyataannya suatu negara yang besar seperti Indonesia tidak dapat dikelompokkan kedalam salah satu bentuk-bentuk diversitas kebudayaan tersebut diatas. Indonesia mengandung ketiga bentuk diversitas itu sehingga masalah multikulturalisme di negara ini menjadi amat kompleks. Dalam

kenyataannya di negeri ini juga terdapat kelompok-kelompok orang yang pengelompokannya bukan didasarkan atas unsur-unsur primordial namun bentuk, peran dan permasalahannya identik dengan masalah etnik. Kami menamakan kelompok ini sebagai "kelompok etnik baru", yang berkembang sesuai dengan perkembangan gaya hidup". Adapun yang menyatukan kelompok-kelompok ini adalah gaya hidup yang merupakan refleksi dari perkembangan dan perubahan kehidupan serta globalisasi dalam profesi. Profesi yang sama yang telah menciptakan gaya hidup yang sama pada gilirannya telah membentuk kelompok-kelompok baru yang nampak seperti etnik grup. Namun kelompok baru ini mencakup dan memotong lintas kelompok etnik tradisional. Bila dalam kelompok etnik tradisional pengikatnya adalah persamaan daerah asal yang kemudian dilengkapi dengan persamaan bahasa, persamaan nilai, persamaan kepercayaan (Watson,2000:1), maka yang mengikat kelompok etnik baru adalah persamaan profesi ataupun persamaan interest, yang kemudian diikuti dan dilengkapi dengan persamaan bahasa, persamaan gaya hidup, persamaan nilai, yang kesemuanya ini merupakan identitas dari profesi mereka. Kami melihat ini sebagai bentuk keempat dari tiga macam diversitas kebudayaan yang ditawarkan Parekh dan kelompok ini kami namakan "profesional interest diversity".

Kelompok "professional interest diversity" menurut hemat kami menjadi amat penting dan bahkan dalam perkembangannya nanti dapat mengalahkan diversitas dari kelompok etnik, karena unsur yang mengikat mereka merupakan unsur-unsur yang dominan dan terus berkembang mengikuti irama globalisasi. Unsur ini berkaitan erat dengan pengembangan keterkaitan profesi dan gaya hidup serta nilai-nilai sebagai simbol kelompok. Hal ini

membuat kelompok profesional interest diversity menjadi lebih menonjol karena proses komunikasi dan globalisasi. Sebagai contoh ambillah kelompok penggemar sepak-bola, pemuja kelompok musik, kelompok internet yang kesemuanya memiliki ciri-ciri etnik grup kecuali bahwa faktor pengikat utamanya adalah unsur kehidupan moderen universal yaitu profesi serta interest dan inilah yang menyebabkan kelompok ini menjadi lebih luas dan bertahan berdampingan dengan kelompok etnik tradisional yang lebih lokal sifatnya. Memang kelompok professional interest diversity bersifat universal. Ciri-cirinya yang menyerupai kelompok etnik menyebabkan permasalahan yang melekat dalam kelompok profesional interest diversity ini juga sama dengan masalah etnis.

Mobilitas dari kelompok-kelompok etnik menciptakan masalah diversitas kebudayaan pada semua tingkat dan ruang tataran kehidupan. Masalah konflik antar kelompok, masalah kebudayaan dominan, masalah kebudayaan nasional adalah beberapa masalah yang menonjol dan saling tumpangtindih. Permasalahan ini menjadi lengkap kompleks diramu dalam permasalahan kebudayaan yang berkaitan dan merupakan bagian dari masalah ekonomi dan politik, masalah kekuasaan, masalah rekayasa, masalah interest dan kepentingan, masalah sumberdaya dan seterusnya.

Untuk meninjau peran negara dalam proses multikulturalism, Boutte mencatat bahwa negara harus melibatkan rakyatnya untuk berpartisipasi dalam proses negosiasi dan pembagian kekuasaan untuk menciptakan hukum yang otentik yang memiliki otoritas moral dan legitimasi. Parekh (1997: 183-185) membagi multikulturalism atas lima bentuk, yaitu, isolationist, accomodative, autonomist, critical atau interactive dan

cosmopolitan multiculturalisms. Isolationist adalah pandangan masyarakat dimana kelompok kebudayaan yang berbeda-beda menjalankan kehidupan otonomi dan hanya interaksi pada tingkat yang amat minim yang dibutuhkan dalam kehidupan bersama mereka. Accomodative multiculturalism menunjuk pada masyarakat yang bergantung pada kebudayaan dominan, tetapi melakukan akomodasi pada kebutuhan-kebutuhan kebudayaan minoritas. Autonomus multiculturalism menunjuk pada masyarakat dimana kelompok-kelompok mayoritas mencari persamaan dengan kebudayaan dominan dan bertujuan menjalankan kehidupan otonomi dalam kerangka politik yang diterima secara kolektif. Critical atau interactive multikulturalism menunjuk pada masyarakat dimana kelompok-kelompok kebudayaan tidak terlalu peduli pada kehidupan otonomi dengan menciptakan kebudayaan kolektif yang merefleksikan perspektif khas mereka. Karena kelompok dominan enggan melakukan hal tersebut, maka kelompok minoritas menantanginya secara politik dan intelektual. Cosmopolitant multiculturalism berusaha mematahkan batas-batas kebudayaan dan menciptakan masyarakat dimana anggota-anggotanya tidak terikat kepada kebudayaan-kebudayaan tertentu, bebas menjalankan intercultural experiments dan mengembangkan kebudayaannya sendiri. Konsep cosmopolitan multiculturalism dari Parekh berjalan beriringan dengan konsep kelompok profesional interest diversity kami tersebut diatas.

Kalau Parekh (2000:1) mencatat bahwa empat dekade terakhir abad 20 menyaksikan munculnya gerakan-gerakan intelektual dan politik yang dilakukan oleh berbagai macam kelompok seperti penduduk asli, golongan minoritas, kelompok etnis, imigran, gerakan wanita, lesbian dan gay, dan kelompok lingkungan hidup, maka Indonesia baru mengalami ini pada pasca

reformasi. Keterlambatan kehadiran Indonesia dalam panggung ini disebabkan politik penekanan ORDE BARU dengan konsep mono culturenya dengan obat generik SARA (Suku-Antar Golongan, Ras dan Agama) yang akhirnya meledak tanpa terkontrol pada pasca reformasi. Gerakan ini kini terus bermain dipanggung kehidupan bangsa Indonesia dalam berbagai aspeknya, dari aspek hiburan hingga politik. Dengan caranya masing-masing mereka ingin masyarakat mengakui legitimasi perbedaan mereka yang menurut mereka bukanlah hal yang remeh dan kebetulan, tetapi muncul dan dibentuk oleh identitas mereka. Jadi gerakan-gerakan ini merupakan perjuangan untuk pengakuan identitas dan perbedaan, atau perbedaan yang berhubungan dengan identitas (*identity related differences*). Meskipun gerakan-gerakan baru ini kadang-kadang dikelompokkan dalam istilah multikulturalisme, dalam kenyataannya istilah ini hanya mencakup beberapa diantara mereka. Multikulturalisme bukan hanya mengenai perbedaan dan identitas tetapi mengenai identitas yang dibentuk dan dipertahankan serta direkayasa; jadi multikulturalisme kumpulan kepercayaan dan praktek dalam arti sekelompok orang mengerti mengenai diri mereka dan dunia serta mengorganisir anggotanya dan kehidupan kolektif mereka.

***Hadirin yang terhormat,***

Sejak kemerdekaan hingga tumbanganya Orde baru Indonesia lebih diwarnai dengan bentuk *accommodative multiculturalism* dimana masyarakat lebih kompromi pada kebudayaan dominant serta kebudayaan nasional. Dengan cara ini pemerintah Indonesia dapat mengatur kebudayaan dan mengasimilasikan kelompok inferior menjadi satu. Kebjaksanaan ini memunculkan *monoculturalism* yang amat dekat dengan

kebijaksanaan asimilasi. Pada pasca reformasi yang diwarnai dengan semangat otonomi daerah setiap kebudayaan berhak mendapat penghargaan dan menikmati kebebasan dan kesempatan untuk mempertahankan dan reproduksi diri mereka. Kebijakan pertama adalah yang telah ditempuh oleh pemerintah ORBA yg membawa pada monoculturalism. Ini membawa keluhan pada banyak pihak (Kleden, 2002; Soeparlan, 2003) dan telah membawa respon Jurnal Antropologi pada simposium ke 3 di Bali yang mengangkat tema multikultural.

Respon JAI (Jurnal Antropologi Indonesia) dalam menanggapi kebijakan pemerintah merefleksikan kecewaan terhadap kebijakan Orba tersebut. Pemakarsa simposium amat yakin bahwa kebijakan multikultural akan menyelamatkan pemerintah Indonesia dari kemelut pluralisme kebudayaan yang dihadapinya. Simposium menawarkan bentuk kedua dalam kebijakan multikulturalisme yaitu memberikan hak pada setiap kebudayaan untuk menikmati kebebasan dan mendapat kesempatan untuk mempertahankan dan reproduksi diri mereka. Namun Shahab (2003) memperingatkan kemungkinan-kemungkinan yang akan dihadapi pemerintah Indonesia. Belajar dari pengalaman Betawi yang pernah menjadi etnik inferior selama beberapa dekade tetapi berkat proses rekacipta budaya, bahkan kesenian, yang dijalaninya maka penduduk asli Jakarta ini berhasil mengangkat dan memposisikan dirinya sebagai salah satu kelompok etnik dominan di Jakarta.

***Hadirin yang terhormat,***

Dalam studi saya mengenai rekacipta tradisi pada orang Betawi tampak bahwa proses rekacipta tradisi dapat menciptakan

---

kekuasaan melalui penguatan identitas dan eksistensi satu kelompok. Betawi merupakan penduduk asli Jakarta yang pernah terpuruk dan tersingkirkan eksistensinya selama beberapa dekade. Salah satu sebab utama keterpurukan kelompok ini adalah masalah krisis identitas sehingga menempatkan posisi mereka sebagai kelompok inferior di Jakarta. Situasi krisis identitas ini pada gilirannya secara perlahan-lahan mengikis eksistensi penduduk asli Jakarta ini di tanah asal mereka. Secara dialektik hal ini lebih mempercepat proses penghilangan tradisi dan identitas orang Betawi. Demikianlah penduduk asli Jakarta ini tersingkir dan tenggelam.

Melihat maraknya gejala rekacipta budaya pada pasca reformasi, bahkan dilakukan oleh kelompok dominan ekonomi, menurut saya bukanlah hal yang mustahil kebijaksanaan multikultural ini akan membawa Indonesia kembali ke monoculture. Bedanya kalau pada masa Orde Baru monoculture ciptaan pemerintah Orde Baru, kini bentuk monoculture adalah kebudayaan dominan dari etnik dominan. Indonesia kembali dibawa kepada vulnerablenya masalah etnis. Indonesia keluar dari mulut singa dan masuk ke mulut buaya. Shahab mempertanyakan apakah pemerintah Indonesia telah siap menghadapi ini? Lalu kebijaksanaan multikultural yang bagaimana yang aman, yang tidak membawa Indonesia kembali kepada monokultur kebudayaan dominan. Baiklah kesempatan ini akan mencoba mengupas masalah ini.

Proses terpuruknya orang Betawi Jakarta merupakan proses alamiah yang terus berlangsung karena tak pernah ada sentuhan untuk menghambat ataupun menghentikannya. Tak ada pihak yang menyadari ataupun peduli. Ada sekelompok kecil dari

orang Betawi yang prihatin akan keberadaan kelompoknya, namun kekuatan mereka tidak dapat menandingi arus perkembangan di kota ini. Titik ini mulai berubah ketika gubernur Jakarta saat itu, Letnan Jendral Ali Sadikin, terkesan dan mulai memberikan gebrakan pada kesenian Betawi. Kebijaksanaan ini yang bukan menjadikan Betawi sebagai obyek melainkan sebagai subyek telah membangkitkan kepedulian masyarakat Betawi sendiri. Demikianlah proses rekacipta tradisi menjadi marak baik yang dilakukan pemerintah, badan-badan kesenian, perorangan maupun masyarakat Betawi sendiri. Secara perlahan-lahan Betawi muncul ke permukaan. Dalam proses komoditisasi kebudayaan, tradisi Betawi laris keras. Identitas Betawi menjadi nyata sehingga eksistensi kelompok inipun mapan. Kepercayaan diri akan eksistensi membawa kelompok ini pada kesadaran hak-hak mereka, hak budaya, hak sosial, hak ekonomi dan hak politik. Melalui organisasi-organisasi sukarela orang Betawi ini berhasil menciptakan otoritas kelompok mereka. Kini kelompok Betawi eksis dengan identitas nyata walaupun sebagian merupakan hasil rekacipta. Rekacipta tradisi berhasil menciptakan eksistensi dan otoritas dari kelompok yang tersingkir dan tenggelam.

Kasus Betawi memberikan pelajaran bahwa dengan sentuhan dan perhatian masalah budaya dapat dibentuk sesuai dengan rencana. Kebudayaan bukan hanya dapat dijaga kelestariaannya, dijaga perkembangannya tetapi juga bahkan diciptakan bukan saja oleh pemiliknya tetapi juga oleh pihak luar. Kalau tanpa direncanakan ternyata proses rekacipta ini dapat membawa pada kekuasaan, maka dengan perencanaan yang baik maka proses ini dapat dipercepat. Apapun bentuk prosesnya, satu hal yang nyata proses ini membawa pada kekuasaan pemiliknya yang bisa menciptakan dan membawa pemiliknya menjadi

kelompok dominan. Jadi proses rekacipta ini dapat di proyeksi dan direncanakan, tetapi juga dapat dikontrol jangan sampai proses ini yang diharapkan mengembangkan potensi kelompok justru membawa pada permasalahan multicultural.

### *Hadirin yang saya muliakan*

Bila menggunakan pandangan kritis kini dapat disaksikan bagaimana proses rekacipta amat marak akhir-akhir ini khususnya setelah reformasi. Proses ini mencakup usaha-usaha menghidupkan kembali tradisi yang telah mati yang kami namakan *revived traditions*; usaha-usaha ini juga mencakup mengakomodir tradisi yang telah mati dalam arti bentuk dan fungsi sehingga dapat memenuhi kebutuhan-kebutuhan baru yang ada, proses mana kami namakan sebagai *re-created traditions*; bahkan usaha ini meliputi usaha untuk menciptakan tradisi baru dengan meramunya dari bahan-bahan tradisi yang telah tenggelam sehingga terbentuklah tradisi baru dengan fungsi baru yang kami namakan *invented traditions*.<sup>4</sup> Usaha ketiga ini amat mempercepat pengkayaan tradisi suatu kelompok dan dapat memenuhi tuntutan kebutuhan yang ada. Belajar dari kasus Betawi jelas ini akan memperkuat otoritas kelompok terkait. Bila ini dianggap dapat menciptakan kesenjangan sosial, sepatutnya hal seperti ini mendapat perhatian dari pemerintah akan ruang gerak rekacipta budaya dari kelompok-kelompok diversitas yang ada di negeri ini.

---

<sup>4</sup> Pengelompokan rekacipta tradisi ini merupakan hasil studi empiris dari *Kebangkitan Kembali Tradisi Betawi di Jakarta* dari penelitian kami diantar orang Betawi pada tahun 1988 hingga 1990.

## KESIMPULAN

Diversitas kebudayaan Indonesia merupakan potensi yang harus dijaga dan dihadapi sebagai suatu kenyataan dengan menghindari politik burung unta seperti yang dijalankan selama masa pra-reformasi. Diversitas kebudayaan berarti ada perbedaan sehingga kebijaksanaan pemerintah yang menekankan pada keseragaman dan menyembunyikan keragaman bukanlah tindakan yang tepat. Kesalahan strategi menangani kenyataan ini menyebabkan diversitas kebudayaan yang seharusnya merupakan potensi dan anugerah telah berubah menjadi musibah. Menyadari adanya diversitas kebudayaan ini sebagai suatu kenyataan sudah seharusnya pemerintah mendukung berkembangnya kebudayaan setiap kelompok. Organisasi sukarela (*voluntary associations*) dari setiap kelompok merupakan wadah yang ideal untuk proses rekacipta budaya setiap kelompok etnik. Namun eratnya proses rekacipta budaya dan pembentukan kekuasaan, menuntut strategi untuk memproyeksi kemungkinan-kemungkinan dominasi kelompok lewat kebudayaan, sehingga dapat dihindari proses manipulasi kebudayaan untuk interest dan kekuasaan kelompok tertentu. Situasi ini menuntut adanya lembaga khusus dalam pemerintahan yang menangani masalah-masalah kebudayaan dengan memperdayakan SDM yang profesional di bidang ini. Ahli kebudayaan wilayah merupakan kebutuhan yang tak dapat dihindari. Gejala munculnya kelompok-kelompok yang keanggotaannya berdasarkan kesamaan interest dan profesi namun lintas etnis serta memiliki ciri-ciri sebagai kelompok etnik, yang kami namakan kelompok etnik lintas primordial, merupakan wadah alamiah pengimbang etnik yang ikatan keanggotaannya berdasarkan faktor-faktor primordial. Kesadaran akan keragaman kebudayaan dituntut sebagai

pengetahuan pada tahap yang amat dini dalam pendidikan formal. Ironisnya, lembaga pendidikan yang ada jauh dari cukup untuk mampu memproduksi SDM yang dapat memenuhi tantangan ini.

### ***Hadirin yang saya muliakan***

Sebelum saya mengakhiri orasi ini, ijinilah saya menyampaikan rasa terimakasih saya kepada pihak-pihak yang telah amat berjasa dalam perjalanan karir saya hingga jenjang guru besar tetap di FISIP UI.

Pihak yang amat berjasa dalam peristiwa ini tentunya kedua orangtua kami, almarhum ayahanda Zaki bin Ali bin Shahab dan almarhumah ibunda Lulu al Hadad yang telah menghantar, berjuang, menyemangati dan banyak berkorban dalam membawa kami ke dunia pendidikan. Semangat dan kepercayaan diri merupakan hasil karya kedua orangtua kami yang amat kami muliakan. Ibu mertua kami, almarhumah Sehat al Hadar juga amat membantu dengan pengertian yang beliau berikan akan kesibukan menantunya. Mereka amat bangga akan prestasi yang kami capai namun sayangnya mereka semua tak sempat menikmati peristiwa ini.

Orang pertama yang menghantar kami ke dunia antropologi adalah Bapak Prof. Dr. Fuad Hasan yang berhasil meyakinkan orangtua kami untuk memilih bidang studi ini ketika kami bermaksud mendaftarkan diri ke Universitas Indonesia pada tahun 1968. Terimakasih Kak Fuad.

Kami juga amat berterimakasih pada masyarakat dan tokoh-tokoh Betawi yang amat membantu kami dalam menjalankan penelitian kami yang berkesinambungan.

Para guru kami mulai tingkat Sekolah Dasar hingga jenjang universitas tentunya merupakan pihak yang amat berjasa dalam membentuk kami menjalani tahap-tahap karir yang panjang ini. Walaupun ingin, namun tak mungkin bagi kami untuk menyebutkan nama mereka satu per satu, karena jumlahnya yang terlalu besar. Namun beberapa diantaranya mempunyai peran yang amat khusus. Bapak Koentjaraningrat telah berperan bukan saja sebagai guru, tetapi juga sebagai orangtua dan terus tak pernah berhenti memantau dan mendorong karir kami hingga akhir hayat beliau. Sumbangan beliau bukan cuma masukan ilmu, tetapi juga waktu, tenaga, usaha, perhatian, kepedulian serta perjuangan dalam penciptaan kesempatan untuk pengembangan karir kami. Bapak Jacob Vredendregt membentuk semangat dan kepercayaan diri. Bapak James Danandjaja merupakan bekas guru kami yang terus mendorong dan mengingatkan tugas kami, bahkan kadang-kadang memarahi kami sebagai orangtua karena lalai dalam perjuangan mencapai posisi sebagai guru besar. Bapak Yunus Melalatoa berperan dalam membaca tulisan-tulisan kami. Kepada Dian, Irwan, Ezra, Jajang, Rahmi, Ima, mbak Erlita, Juki, Raymond, Tiwi dan Rini terimakasih telah membantu kami dalam melaksanakan pidato ini. Bapak DR. Tarmizi Thahir merupakan teman yang terus menerus menagih janji saya untuk menyampaikan pidato pengukuhan. Ibu Masliana, terimakasih bu atas peringatan-peringatan akan ketidakpedulian saya untuk melakukan orasi ini. Banyak pihak yang terus menagih janji akan undangan, pak Sigit, pak Nardji, pak Manaf, adalah beberapa nama diantaranya. Keluarga besar al Shahab, khususnya bin Zaki -Mudrik, Anwar, Halim, Ali, Daniel, Lusi dan Nani serta keluarga besar al Hadar terus mendorong saya untuk menyempurnakan perjalanan panjang ini. Lusi, terimakasih banyak atas semangatnya. Terimakasih semuanya, tuntutan dan dorongan

anda telah membawa kami ke acara ini. Akhirnya terimakasih kepada teman-teman dan para mahasiswa yang telah menyelenggarakan kesempatan ini sehingga saya berhasil memenuhi janji saya kepada berbagai pihak yang telah mendorong dan menyemangati saya .

Saleh Umar, suami yang saya panggil Leks, puteri dan putera tercinta dan yang amat saya banggakan Maryam Catlea yang saya panggil Amia dan Hussein Haykal yang saya panggil Ujiku, bukan saja merupakan pemberi semangat dan dukungan dalam segala bentuknya, tetapi juga seringkali merupakan kurban dalam perjalanan karir ini. Penyitaan waktu, tenaga, perhatian serta tekanan emosi menyebabkan kami kadang-kadang tidak mampu menjalankan peran kami sebagai istri ataupun ibu secara sempurna. Mungkin ini kesempatan yang paling tepat untuk meminta maaf. Amia, terimakasih yang khusus karena tidak pernah putus asa dengan tuntutannya sehingga merupakan semangat yang mendorong kami untuk melakukan orasi ini dan orasi ini khusus umi persembahkan sebagai hadiah perkawinan 18 Juni mendatang.

Akhirnya kepada semua pihak kami berharap mudah-mudahan usaha kami ini dapat memberikan kegembiraan pada semuanya. Demikianlah para hadirin sekalian kami mengahiri pidato pengukuhan ini dan kami mohon maaf bila dalam perjalanan karir ini ataupun dalam penyelenggaraan peristiwa ini ada yang tidak berkenan di hati. Terimakasih.

**Wassalamualikum warahmatullahi wa barokatuh**  
**Jakarta, 24 Mei 2006**

## DAFTAR BUKU

- Appadurai, Arjun. 1994. "Global Ethnoscape : Notes and Queries for A Transnational Anthropology" *Recapturing Anthropology : Working in the Present* (ed. R.G.Fox) : 191-211 New Mexico: School of American Research Press
- Barth, F .1970. *Ethnic Groups and Boundaries* Oslo, Scandinavian Universitets Forlaget : University Books
- Bernard S. Cohn. 1989. " Authority in Victorian India" *The Invention of Tradition* (ed. E.Hobsbawm dan T. Ranger) Cambridge University Press: 165-211
- Boulte,G. 1994. *Multicultural Education: raising Consciousness*. Boston, Wadsworth Co
- Bruner, E.M. 2005. *Culture on Tour* The University of Chicago Press
- Budianta, Melani. 2006. *Meretas Batas: Humaniora Dalam perubahan*. Pidato pada Upacara pengukuhan sebagai Guru Besar Tetap Fakultas Ilmu Pengetahuan Budaya Universitas Indonesia
- Comaroff, J.L. 1987. "Of totemism and ethnicity: consciousness, practice and the signs of inequality" *Ethnos* 52: 301-323
- DeValle S.B.C. 1987. *Discourses of Ethnicity: the adivasi of Jharkand*. Disertasi PhD. School of Oriental and African Studies. London
- De Grave, Jean-Marc. 2000. "Transmisi Pengetahuan dan Nilai Budaya Masyarakat Indonesia Ditinjau dari Ajaran Kanuragan Jawa." *Antropologi Indonesia* Indonesian Journal of Social and Cultural Anthropology Th XXIV no. 61 Jan- April : 71-84

- Ermansyah. 2005. "Ethnoscape: Nuansa Baru untuk Etnografi di dalam Antropologi" *Etno Visi Jurnal Antropologi Sosial Budaya* Vol. 1 no. 1 : 24-27
- Fried, M.H. 1970. *The Study of Anthropology* New York Thomas Y Crowell Company
- Hobsbawm,E dan TerenceRanger. 1987. *The Invention of Tradition* Cambridge University Press
- Keyes, C.F. 1981. The dialectics of ethnic change" in *Ethnic change* (ed. C.F. Keyes) London : University of Washington Press
- Marzali, Amri. 2002. *Ilmu Antropologi Terapan bagi Indonesia yang Sedang Membangun* Pidato Pengukuhan Guru Besar
- Mearns, D. 1986 "Do 'Indian' Exist? The Politics and Culture of Ethnicity." In *Etnicity and Ethnic Relations in Malaysia* (ed. Raymond Lee . Northern Illinois University, Centre for South East Asian Studies. Monograph Series on South East Asia. Occasional paper n0. 12.
- Gunawan, Istutiah. 2000. *'The Peaceful Forest' and the Poisonous Forest : The impact of Tourism on the Inhabitants of Setema on Moyo Island, Sumbawa. Makalah dipresentasikan dalam Simposium International "Globalization and Local Culture : a Dialectic Toward the New Indonesia 18-20 Juli 2000*
- Nagata, J. 1974. "What is Malay? Situational Selection of Ethnic Identity in Plural Society. *American Ethnologist* 1 : 331-350
- Othman, M.A. 1979. *The Dynamics of Malay Identity*. Monograph Fakultas Sains Kemasyarakatan dan Kemanusiaan. Universiti Kebangsaan Malaysia.

Parekh, Bhikhu. 1977. "National Culture and Multiculturalism" *Media and Cultural Regulation* (ed. Kenneth Thompson) London-Thousand Oaks-New Delhi: SAGE Publications in association with Open University : 163-194

Ranger, Terence. 1987. "The Invention of Tradition in Colonial Africa" *The Invention of Tradition* (ed. E.Hobsbawm dan T. Ranger) Cambridge University Press:211-263

Roosens, E.E, 1987. *Creating Ethnicity. The Process of Ethnogenesis*. London, Sage Publications.

Ross, J.A. 1979. "Languages and the Mobilization of Ethnic Identity" *Language and Ethnic Relations* (ed. H.Giles dan B.S.Jaques) Oxford" Pergamon Press

Saifuddin, A.F. 2001. "Kebijakan Otonomi Daerah : Otonomi Pendidikan dalam Perspektif Sosial Budaya" *Jurnal Antropologi Indonesia* : 65

Sunarto, Kamanto, Russel Hianh-Khng Heng, Achmad Fedyani Saifudin. 2004. Introduction" *Multicultural Education in Indonesia and Southeast Asia. Stepping Into the Unfamiliar* (ed. Sunarto, Kamanto, Russel Hianh-Khng Heng, Achmad Fedyani Saifudin). *Jurnal Antropologi Indonesia*.

Shahab, Yasmine. 1994. *The Creation of Ethnic Tradition. Betawi of Jakarta*. Submitted for the degree of Doctor of Philosophy, School of oriental and African Studies. Univerity of London.

1994."Siapakah orang Betawi?" *Betawi dalam Perspektif Kontemporer* (ed. Y.Z. Shahab) Jakarta: Lembaga Kebudayaan Betawi

2002. *Sebagai Ekspresi Eksistensi. Tantangan Kebijaksanaan Multikulturalisme* Disajikan dalam Symposium and Workshop Anthropology di Bali: Rebuilding Indonesia, a Nation of Unity in Diversity. Towards a Multicultural Society. 2002

2002. *Identitas dan Otoritas. Rekonstruksi Tradisi Betawi* Laboratorium Antropologi FISIP UI

Trevor-Roper, Hugh. 1989. "The Invention of Tradition: The Highland Tradition of Scotland" *The Invention of Tradition* (ed. E.Hobsbawm dan T.Ranger) Cambridge University Press

Trudgill, P & G.A. Tzavaras. 1997. "Why Albanians Greeks are not Albanian. Language Shifts in Altica and Biotia" in *Language and Intergroup Relations* (ed. Giles) London : Academic Press (for) European Association of Experimental Social Psychology.

## RIWAYAT HIDUP

Nama : Yasmine Zaki Shahab  
 NIP : 130520397  
 Tempat/Tanggal Lahir : Jakarta, 1 Desember 1948  
 Agama : Islam  
 Jabatan Struktural : Ketua Departemen Antropologi FISIP UI  
 Status Perkawinan : Menikah  
     Suami : Drs. Saleh Umar MA.  
     Anak : Maryam Catlea SE, Ak.  
           Hussein Haykal  
     Orangtua : Zaki Shahab/Lulu Al Hadad  
  
 Alamat : Jl. Masjid Bendungan Gg. II no. 11 Dewi  
           Sartika, Cawang III Jakarta 13631  
 Kantor : Departemen Antropologi FISIP UI,  
           Kompleks UI Depok Telp : 7870348

### Pendidikan:

SD : St. Melania, Jakarta, 1961  
 SMP : St. Maria, Jakarta, 1964  
 SMA : St. Ursula, Jakarta 1967  
 S1 : Antropologi, Universitas Indonesia, Jakarta, 1975  
 S2 : Demografi, The Australian National University,  
     Canberra – Australia, 1982  
 S3 : Antropologi – School of Oriental and African Studies  
     University of London, London, 1993

## **Riwayat Pekerjaan:**

Staf pengajar tetap di Departemen Antropologi FSUI 1975 - 1984

Staf pengajar tetap di Departemen Antropologi FISIP UI 1984 – sekarang

Pengajar Universitas Islam Averoes 1984-1987

Pengajar STIAMI 1995-1997

Pengajar Universitas Islam Azzahra 1995-2000

Pengajar Pasca Demografi FEUI 2000-2002

Pengajar Dep. Pertahanan Keamanan RI Pusat Bahasa Pertahanan  
Keamanan 2002 – 2004

Instruktur dalam Pelatihan Penelitian Sosial 2001-2002

Staf Peneliti Lembaga Demografi FEUI 1975-1978

Staf Peneliti Perkumpulan Keluarga Berencana Indonesia – 1977 - 1980

Peneliti LEKNAS – 1969-1974

Peneliti BKKBN – 1969-1974

Peneliti LIPI 1998 – 2004

Sekretaris Jurusan Antropologi 1983-1985

Ketua Program Studi Perjalanan Usaha Wisata Budaya FISIP UI  
1997-2000

Kepala Bidang Penelitian dan Pengembangan Program Diploma  
Pariwisata FISIP UI 2000-2004

Dewan Pembina D3 Pariwisata FISIP UI 2004 - sekarang

Dekan FISIP Universitas Islam Azzahra 1996 – sekarang

Ketua Departemen Antropologi 2004 – sekarang

Anggota Panitia Persiapan Pembentukan Program D III Pariwisata, 1996

Badan Pelaksana Penataan (BPP) FISIP UI 2000-2001

Dewan Pembina Biro Perjalanan Wisata Makara 2002

Anggota Panitia Pendirian Laboratorium Program Diploma DIII Pariwisata  
FISIP UI 2001

Anggota Senat FISIP UI wk. Departemen Antropologi 2000-2004

Ketua panitia Penyempurnaan Kurikulum Jurusan Antropologi FISIP UI  
18 Januari-31 Maret 2002

Panitia Pemilihan Dekan FISIP UI 2002-2006

Dewan Redaksi Jurnal Antropologi Indonesia – 2004 sekarang

*Dewan Redaksi Majalah Darul Aitam* 2002 – sekarang

Anggota Yayasan Assalam 1999 – sekarang

Ketua Betawi Society 1997 – sekarang

Dewan Pakar Lembaga Kebudayaan Betawi 2003 – sekarang

Dewan Pakar BAMUS BETAWI 2005 – sekarang

Dewan Pakar Perkampungan Budaya Betawi 2002 - sekarang

Dewan Pakar Forum Komunikasi Mahasiswa Betawi 2003 - sekarang

Dewan Pakar Forum Komunikasi Betawi (FORKABI) 2004 –sekarang

Dewan Pakar Masyarakat Melayu se Indonesia 2001 – sekarang

Ketua Bidang Penelitian Lembaga Kebudayaan Betawi 1995-1998

Ketua Bidang Pendidikan BAMUS BETAWI 1998-2002

Ketua I Lembaga Kebudayaan Betawi 1999 -2002

Anggota Bidang Agama, Pendidikan dan Budaya BAMUS BETAWI 2001-  
2006

Ketua Litbang Masyarakat Betawi Sejabotabek 2000 – 2002

Penasehat Ikatan Kekerabatan Antropologi 2005 - sekarang

Anggota Himpunan Demografi Indonesia 1976 - sekarang

Anggota Asosiasi Antropologi Indonesia 1995 - sekarang

### **Pengabdian Masyarakat**

Pendiri dan Dewan Redaksi *Jali-Jali. Journal of Betawi Socio-cultural Studies* 1984-1988

Pendiri dan Dewan Redaksi *Jurnal Betawi* 1999 – sekarang

Team Asistensi Pembangunan Perkampungan Betawi 1999 - 2002

- Koordinator dalam Kegiatan Lokakarya Persiapan Pembangunan Perkampungan Budaya Betawi 1997
- Penanggungjawab Seminar Persiapan Pembangunan Kampung Budaya Betawi 1997
- Pembicara dalam Seminar Persiapan Pembangunan Kampung Budaya Betawi 1997
- Moderator Seminar Persiapan Pembangunan Kampung Budaya Betawi 1997
- Ceramah Umum di SMU - Tahap Awal Pelatihan Guru-Guru Antropologi di SMU di Jakarta April 1998
- Narasumber dalam Sosialisasi Perda 1998 di Kelurahan Tebet
- Koordinator Sarasehan Benyamin Artis Betawi 1998
- Dewan Juri Lomba Mengarang Bidang Pariwisata 1998
- Penyelenggara Seminar Persiapan Pembangunan Perkampungan Budaya Betawi 1998
- Team Asistensi Pembentukan Master Plan Perkampungan Budaya Betawi 1998
- Pembicara dalam seminar "Pemberdayaan Wanita Penyandang Cacat Dalam Upaya Meningkatkan Integrasi Nasional" 9 Desember 1998
- Penyelenggara/Penanggungjawab Dalam Pelatihan Guru-Guru Antropologi di SMU di Jakarta 29 Juni - 3 Juli 1998
- Peserta aktif dalam pertemuan "Perduli Pariwisata" 1998
- Ceramah "Posisi Wanita dalam Islam" di pengajian Masyarakat Indonesia di London 1989
- Ceramah "Fungsi Sembahyang Dalam Kehidupan Modern" pada Pengajian Masyarakat Indonesia di London 1991
- Ceramah Umum di SMU Tahap Awal Pelatihan Guru-Guru Antropologi di SMU di Jakarta 2 - 16 Agustus 1999
- Penyelenggara/Penanggungjawab dalam Pelatihan Guru-Guru Antropologi di SMU di Jakarta 26 Juli - 9 Agustus 1999
- Peserta aktif Round Table Discussion oleh INCIS 14 Agustus 1999

- Penceramah dalam "Kearifan Lokal Dalam Menata Lingkungan Yang Harmonis" Kanwil Depdikbud Jakarta 5 Agustus 1999
- Pembicara dalam "Jakarta sebagai Pertemuan Adat dan Budaya" Oleh Museum Sejarah Jakarta 25 Agustus 1999
- Penceramah dalam Penyuluhan Kebudayaan oleh Kanwil Depdikbud Jakarta 1 s/d 5 Februari 1999
- Peserta Aktif "Konflik Antar Etnik dan Masalah Kebangsaan" oleh INCIS (Indonesian Institute for Civil Society) 14 Agustus 1999
- Steering Committee pada Raker LKB 1999
- Pembicara dalam Diskusi Ramadhan oleh Aspirasi Mahasiswa Betawi UNJ "Peranan Mahasiswa Betawi Dalam melestarikan Adat dan Budaya Untuk Menjawab Tantangan Jaman" 28 Desember 1999
- Team Master Plan Perkampungan Budaya Betawi 1999
- Peserta dalam Forum Dialog Masyarakat Betawi 1999
- Pembicara dalam Kursus Budaya Angkatan I oleh Lembaga Kajian Budaya Nusantara 13 November 1999
- Peserta Aktif dalam diskusi "Masyarakat Betawi Dalam perspektif Sosiologis dan Antropologis" di IAIN 30 Juni 1999
- "Fungsi Majelis Taklim dalam kehidupan Masyarakat Kompleks" disajikan pada acara Majelis Taklim Bumi Sakinah 27 Februari 1999
- Steering Committee pada Seminar Pemilihan Gubernur Betawi 2000
- Steering Committee pada Raker Lembaga Kebudayaan Betawi 5-6 Febr. 2000
- Koordinator seksi Penulisan Ismail Marzuki Mei 2000
- Panitia Gelar Budaya Betawi Oleh Lembaga Kebudayaan Betawi 14-18 Juli di Bale Ayer Jakarta 2000
- Pembicara dalam Sarasehan Pekan Kebudayaan Betawi 25 Nov 2000
- Peserta aktif dalam Lokakarya Penulisan Buku Bacaan Ragam Budaya Betawi untuk SD dan SMP oleh Dinas kebudayaan DKI Jakarta 24 November 2000
- Nara sumber dalam Ngobrol Santai Tentang Betawi di Karawaci 17 Mei 2000

Pembicara dalam Sarasehan Pertemuan Unsur Tionghoa dan Unsur Betawi Dalam Kesenian oleh Dinas Kebudayaan Jakarta 9 November 2000

Peserta aktif dalam Sarasehan Pemberdayaan Perkampungan Budaya Betawi oleh Keluarga Mahasiswa Betawi Komisariat IAIN, IIQ dan PTIQ 25 November 2000

Narasumber dalam Pelatihan Kepemimpinan Mahasiswa Betawi (PKMB) "Berdasarkan Nilai-Nilai Kebenaran Kita Kembangkan dan Lestarkan Budaya Betawi" 14 Oktober 2000

Pembicara dalam kegiatan Dialog Antar Agama 3 Juni 2000

Moderator pada Silaturahmi Nasional Ulama, Habaib dan Asatizh 2000

Narasumber dalam Pelatihan Intensif Community Relations di Era Euforia Reformasi Oleh Delicom Public Relations 28 Juni 2000

Pembicara dalam Seminar Sehari "Menyoal Daya Tahan Keseimbangan Tradisional" Juni 2000 oleh MADIA (Masyarakat Dialog Antar Agama)

Fasilitator dalam pertemuan dengan Pimpinan Dayak di Kalimantan Tengah dalam Konflik Dayak Madura 2000

Pembicara dalam "Rekonsiliasi dan Penanganan Konflik Sosial di Indonesia" oleh Badan Administrasi Kependudukan dan Mobilitas Penduduk RI 20 November 2000

Team perumus dalam Sarasehan Perkembangan Busana Adat Betawi 22 Agustus 2000

Team Perumus Buku Pedoman PKL D III Pariwisata FISIP UI 2000

Steering Committee dalam diskusi Publik "Siapakah Orang Betawi Jadi Gubernur?" 8 Oktober 2001

Pembicara dengan judul "Telaah Kristis Sosio-kultural Masyarakat Betawi Dalam Upaya Penguatan Gubernur Putera Daerah" dalam acara "Siapakah Orang Betawi Menjadi Gubernur Jakarta" 8 Oktober 2001

Team penyusunan Buku Pedoman Jenjang Pendidikan Diploma III FISIP UI 2001/2

Steering Committee Raker BAMUS BETAWI 2001

- Narasumber dalam Pelatihan Kepemimpinan Mahasiswa Betawi oleh FKMB 13-17 Oktober 2001
- Peserta aktif dalam workshop Media Roles and Transparency Issues at Provincial/Local level oleh UNESCO and Jaring Line 2001
- Pembicara dalam "Betawi ditinjau dari Segi Politik, Antropologi dan Sosiologi" oleh Forum Komunikasi Mahasiswa Betawi 3 November 2001
- Moderator dalam "Orientasi Kepemimpinan dan Budaya" oleh Forum Komunikasi Mahasiswa Betawi 2 November 2001
- Moderator dalam Seminar Pekan Kebudayaan Betawi di Taman Ismail Marjuki 6 Oktober 2001
- Kepala Bidang Ilmiah dalam Pekan Kebudayaan Betawi 2001 (4-7 Oktober 2001)
- Pembicara dalam Lokakarya Mulok Betawi 2001
- Narasumber bagi Juri Abang None Jakarta 2001 oleh Lembaga Kebudayaan Betawi 29-30 Maret 2001
- Team perumus dalam Perkembangan Busana Adat Betawi 2001
- Pembicara Bidang Kepariwisata DKI Jakarta Persiapan Juri Abang None oleh Lembaga Kebudayaan Betawi 29 Maret 2001
- Pembicara dalam Lokakarya "Peran Serta Masyarakat Dalam Pembangunan Perkampungan Budaya Betawi" 13 November 2001
- Pembicara dalam Menanggulangi Masalah Sosial di Jakarta 26 November 2001 di Gedung Juang
- Panitia Pelaksana Mengenang Ismail Marjuki, Seniman Betawi 2001
- Pembicara dalam diskusi " Mencari Akar Konflik Horisontal di Jakarta" 24 Nov 2001 oleh Lembaga Kajian dan Pengembangan SDM NU DKI Jakarta
- Narasumber dalam kegiatan Forum Dialog Kemasyarakatan dengan tema "Upaya Membangun Masyarakat yang Tenram dan Tertib" 8 November 2001
- Pembicara dalam Penyuluhan "Kemajemukan dan Adaptasi Budaya Antar Etnis" oleh Kanwil Depdiknas DKI 10 Oktober 2001

Ketua Pelaksana Sarasehan Cagar Budaya dan Permuseuman Propinsi  
DKI Jakarta 6-7 Agustus 2002

Pembicara dalam diskusi "Perspektif Remaja dalam Ikut Membangun  
Jakarta" dalam acara Forum Cinta Bangsa 22 Juni 2002

Team penulis Buku Penganten Adat Betawi (Edisi Revisi) 2002

Pembicara dalam Seminar "Mengoptimalkan Potensi Daerah dalam  
pelaksanaan Otonomi Daerah di Propinsi DKI Jakarta" oleh  
Persatuan Masyarakat Jakarta Mohamad Husni Thamrin 9 Februari  
2002

Team penulisan Buku Busana Betawi oleh Dinas Kebudayaan DKI  
Jakarta 23 Februari 2002

Pembicara dalam "Sosialisasi Persiapan Penyusunan Ensiklopedi  
Betawi" oleh Dinas Kebudayaan Jakarta 9 Juli 2002

Pembicara dalam Pertemuan Mulok Betawi 2004

Steering Committee pada Raker Badan Musyawarah Masyarakat Betawi  
2004

Pembicara dalam Sarasehan Pekan Kebudayaan Betawi 25 Nov 2005

Narasumber dalam Lokakarya Lembaga Kebudayaan Betawi, Februari  
2006

Pakar dalam Pembahasan Masalah keBetawian di Jakarta, 6 Mei 2006

### **Partisipasi dalam kegiatan ilmiah**

1. Peserta aktif dalam Seminar "Culture and Fertility" di Singapura  
Agustus 1977
2. Pembicara dalam diskusi panel BKKBN th 1997
3. Pembicara dalam diskusi panel BKKBN th 1998
4. Peserta aktif dalam kegiatan P dan K Pengembangan dan  
Pembinaan Kebudayaan Daerah Kanwil P dan K Jakarta 1998
5. Peserta aktif dalam diskusi "Konsep Kebudayaan Dewasa Ini:  
Seputar Pertanyaan Mengenai Konstruksi Budaya,  
Essensialisme dan Kebudayaan" Pusat Studi Jepang Depok 20  
Juni 1998

6. Peserta dalam dalam Konperensi "The History and Identity of Jakarta" Leiden 12-13 April 1999
7. Peserta workshop Tehnik-Tehnik Pemanduan 28-29 Januari 1999
8. Pembicara dalam Jubileum Antropologi FISIP UI 6-8 Mei 1999
9. Moderator dalam Jubileum Antropologi FISIP UI 6-8 Mei 1999
10. Peserta aktif dalam seminar "Strategi Pemberdayaan Potensi Wisata Untuk Mengatasi Kelesuan Industri Pariwisata dalam Era Persaingan Bebas" 10 Juli 1999
11. Pembicara dalam "Redefinisi Budaya Nasional" pada kegiatan kursus Budaya Angkatan I oleh Lembaga Kajian Budaya Nusantara 13-14 November 1999
12. Pembicara dalam ulangtahun Museum Sejarah Jakarta Agustus 1999
13. Pembicara dalam kegiatan P dan K berjudul "Pembinaan Nilai-Nilai Budaya dalam Memperkaya Kebudayaan Nasional" 25 Januari 1999
14. Peserta dalam kegiatan "Pemikiran Koentjaraningrat Tentang Antropologi dan Integrasi nasional: Analisa, Kritik, dan pemikiran Baru" 30 Juni 1999
15. Pembicara dalam Kegiatan Pengembangan dan Pembinaan Kebudayaan Daerah di Kanwil P dan K 5 Agustus 1999
16. Pembicara dalam seminar "Prospek dan Pembangunan Masyarakat Jakarta" 2000
17. Pembahas pada Persiapan Kurikulum Program Pasca Kajian Timur Tengah th 2000
18. Peserta Aktif dalam Round table Discussion dengan Tokoh-Tokoh Etnik se Indonesia 2000 di Jakarta
19. Peserta dalam workshop pariwisata 7-8 April 2000 di FISIP UI
20. Pembicara dalam International Symposium and Workshop dengan tema "The Beginning of the 21th Century : Endorsing Regional Autonomy, Understanding Local Cultures, Strengthening National Integration" Makasar, 24-27 Juni 2000.
21. Moderator dalam International Symposium and Workshop dengan tema "The Beginning of the 21th Century : Endorsing

- Regional Autonomy, Understanding Local Cultures, Strengthening National Integration" Makasar, 24-27 Juni 2000.
22. Steering Committee dalam International Symposium and Workshop dengan tema "The Beginning of the 21th Century : Endorsing Regional Autonomy, Understanding Local Cultures, Strengthening National Integration" Makasar, 24-27 Juni 2000.
  23. Peserta dalam seminar "Kebijakan Pembangunan Kawasan Transmigrasi Dalam Rangka Otonomi Daerah" 8 Nov 2000
  24. Pembicara dalam Forum Perpindahan Penduduk 23 Nov. 2000"
  25. Pembicara dalam "Pertemuan Unsur Tionghoa dan Betawi" 9 November 2000
  26. Peserta dalam workshop oleh UNESCO 12-1 November 2001
  27. Peserta aktif kegiatan "Adaptasi Budaya" oleh P dan K Oktober 2001
  28. Panitia Pelaksana Semiloka Kurikulum Program Pasca Sarjana Kajian Timur Tengah 12 Juli 2001
  29. Steering Committee pada International Symposium and Workshop Anthropology Globalization and Local Culture: A Dialectic Towards the New Indonesia di Padang tahun 2001
  30. Moderator dalam International Symposium and Workshop Anthropology di Padang tahun 2001
  31. Pemakalah dalam International Symposium and Workshop Anthropology di Padang tahun 2001
  32. Pemakalah pada International Symposium and Workshop Anthropology di Bali : Rebuilding Indonesia, a Nation of Unity in Diversity. Towards a Multicultural Society. 2002
  33. Moderator International Symposium and Workshop Anthropology di Bali: Rebuilding Indonesia, a Nation of Unity in Diversity. Towards a Multicultural Society. 2002
  34. Steering Committee pada International Symposium and Workshop Anthropology di Bali: Rebuilding Indonesia, a Nation of Unity in Diversity. Towards a Multicultural Society 2002
  35. Pemakalah pada International Symposium and Workshop Anthropology di Jakarta th 2004

36. Moderator International Symposium and Workshop Anthropology di Jakarta tahun 2004
37. Steering Committee pada International Symposium and Workshop Anthropology di Jakarta tahun 2004
38. Penanggungjawab International Symposium and Workshop Anthropology di Jakarta tahun 2004
39. Steering Committee pada International Symposium and Workshop Anthropology di Banjarmasin tahun 2008
40. Peserta Aktif pada Final Report of the Asian Regional Meeting for the Promotion of the Convention for the Safeguarding of the Intangible Cultural Heritage, 20-22 September 2004, New Delhi, India
41. Pembicara dalam kegiatan Gelar Budaya Spiritual dan Kepercayaan Komunitas Adat Mei 2006. Departemen Kebudayaan dan Pariwisata
42. Anggota team Penyusunan Standar Penilai Buku diselenggarakan oleh Badan Standar Nasional Pendidikan, Departemen Pendidikan Nasional April – Juni 2006

#### **Penelitian:**

Penanggungjawab berbagai penelitian Kependudukan, Keluarga Berencana dan sosial-ekonomi di propinsi-propinsi DKI Jakarta, Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur, Bali, Lombok, Aceh, Sumatera Utara, Sumatera Barat, Riau, Sumatera Selatan, Kalimantan Timur, Kalimantan Tengah, Kalimantan Selatan, Sulawesi Selatan, Sulawesi Utara.

#### **Penelitian Lapangan Mandiri:**

1. Masalah Integrasi Masyarakat Arab di Jakarta, Januari–Nov. 1974
2. Fertilitas, Mortalitas & Migrasi di Jakarta Sept. 1977.

3. Pola Perkawinan dan Perceraian di Aceh, Sumatera Barat, Sumatera Utara, Sumatera Selatan, Sulawesi Utara, Sulawesi Selatan, Jakarta, Jawa Barat Februari-Maret 1977
4. Identifikasi Remaja di dua desa di Sumatera Utara 1978
5. Income Generating Peserta KB di Propinsi Lampung 1978
6. Income Generating Peserta KB di Lombok 1978
7. Income Generating Penganyam Tikar di Sumatra Utara 1978
8. Income Generating Nelayan di Bali 1978
9. Penelitian Patang Reso E di Sulawesi Selatan 1978
10. Income Generating Petani di Lombok 1978
11. Program Terpadu Program KB di Lampung 1980
12. Penelitian Tradisi Betawi Juni 1988-Feb 1989; Juni 1989 – Feb 1990
13. Penelitian Tradisi Betawi 2002

#### **Penelitian Lapangan kelompok**

1. Penelitian Perubahan Sosial pada Nelayan di Pelabuhan Ratu (kelompok mahasiswa antropologi FSUI), 1972
2. Penelitian Dinamika Sosial di Gayo, Aceh Tengah (Kelompok Mahasiswa Antropologi FSUI) 1973
3. Penelitian Kesehatan di Banten, 1973 (Kelompok Mahasiswa Antropologi FSUI dan Mahasiswa FKUI)
4. Penelitian Usaha Industri di Jawa Timur, LEKNAS 1974
5. Penelitian Usaha Industri di Bali, LEKNAS 1974
6. Aspek Sosial Budaya dalam Studi Fertilitas di delapan propinsi di Indonesia, LDFEUI 1976
7. Pola Kehidupan Penduduk di Kawasan Industri Riau (2 orang), LIPI 1978
8. Penelitian Korban Banjir di Kalimantan Barat (2 orang) 1978
9. Penelitian Keluarga Berencana di Lampung, Sumatera Utara, Sulawesi Selatan, Bali dan Lombok 1978 – PKBI
10. Pola Perkawinan Masyarakat Betawi, LDFEUI
11. Kebakaran Hutan di Kalimantan Timur, 1983 - KLH

12. Dampak Silang Industri pada Nilai Budaya di Dua Propinsi di Indonesia, LIPI 1985
13. Inventarisasi Nilai Budaya di Kalimantan Barat, P & K 1985
14. Inventarisasi Nilai Budaya dari Suku Terasing di Sepuluh Propinsi di Indonesia Depsos 1985
15. Migrasi di Jawa Timur dan Bali, 1995 LEKNAS
16. Penelitian Pengrajin Intan di Kalimantan Selatan (2 orang), 1997
17. Penelitian Busana Tradisional di Jakarta, 1998 – Dinas kebudayaan DKI
18. Penelitian Perkampungan Budaya Betawi di Condet, Marunda dan Situ Babakan 1999
19. Penelitian Perkampungan Budaya Betawi, 2000 Lembaga kebudayaan Betawi dan Dinas Kebudayaan DKI
20. Penelitian Sejarah Menteng, 2000 Dinas Museum dan Sejarah DKI
21. Penelitian Kesenian Rudat di Lombok, (2 orang) LIPI 1998 - 2000
22. Penelitian Mamanda di Kalimantan Selatan (2 orang), LIPI 2001 - 2003.

## **KARYA TULIS**

### **Skripsi/Tesis/Disertasi**

#### **Skripsi S1:**

*Integrasi orang Arab di Jakarta.* Jurusan Antropologi Fakultas Sastra Universitas Indonesia 1975

#### **Tesis S2:**

*The Position of Betawi Women.* The Australian National University, Canberra, 1982

#### **Disertasi S3:**

*The Invention of Ethnic Tradition. The Betawi of Jakarta* – School of Oriental and African Studies (SOAS) University of London, London, 1993

## Buku

1. *Betawi Dalam Perspektif Kontemporer* (ed. Yasmine Shahab) Lembaga Kebudayaan Betawi 1998
2. *Jakarta – Batavia. Socio-Cultural Essays* (ed. K. Grinjs dan P. Nas) KITLV Press Leiden 2000
3. *Identitas dan Otoritas. Rekonstruksi Tradisi Betawi* 2004 Laboratorium Antropologi FISIP UI
4. *Betawi-Jakarta: Tinjauan Budaya* (ed. Edi Sedyawati) Pusat penelitian Kemasyarakatan dan Budaya Universitas Indonesia 2005
5. *Ali Sadikin – Empu Peradaban Kota* (ed. )2006, IKJ
6. *Betawi Houses and Building Styles in Jakarta: The dynamics of a cultural tradition.* Peter Nas, Yasmine Z. Shahab dan J.J.M.Wuisman (Siap terbit)

## Terjemahan

*Pedoman Analisa Data Sensus* (Bab II, III, V s/d XIII)) Red. P.F. McDonald 1983 Australian Universities International Development Program

## Laporan Penelitian (Mandiri)

1. *Pola Perkawinan dan Perceraian di Indonesia. Sebuah Studi Antara kebudayaan, 1976* LDFE UI
2. *Pola Hidup Remaja di Sumatera Utara* 1978 PKBI
3. *Evaluasi Efektifitas Proyek Patang Reso E, Sulawesi Selatan* 1978 PKBI Jakarta
4. *Monografi Migrasi permanen di Propinsi Aceh. Analisa Data Sensus 1981* LDFEUI Jakarta

5. *Deskripsi Suku bangsa terasing di Kalimantan Barat*. Departemen Sosial 1984
6. *Nilai Budaya di Jawa Timur* 1985 P & K
7. *Nilai Budaya di Kalimantan Barat* 1985 P & K
8. *Deskripsi kebudayaan Kodya Pontianak* 1986 Dept P & K
9. *Deskripsi kebudayaan Jawa Timur* 1986 P & K
10. *Migrasi di Jawa Timur dan Bali* 1987 LEKNAS Jakarta

#### Laporan Penelitian (bersama)

1. *Migrasi Spontan ke Pelabuhan Ratu*, 1973 FSUI
2. *Perkiraan Tingkat Kelahiran, Kematian dan Migrasi di Kelurahan Rawasari* 1975 LD FEUI Jakarta
3. *Busana Betawi* Dinas Museum dan Purbakala Jakarta 1997
4. *Sejarah Menteng* Dinas Museum DKI Jakarta 1998
5. *Kesenian di Lombok. Representasi Dominasi Etnik* Jakarta, LIPI 2001
6. *Cagar Budaya dan Museum Sebagai Aset Pariwisata*.Dinas Kebudayaan DKI Jakarta 2002
7. *Memahami Pluralisme Budaya Melalui Karya Seni* LIPI 2003
8. *Pluralitas Makna Seni Pertunjukan dan Representasi Identitas* LIPI 2004

#### Artikel dalam Jurnal

1. "Do Classes co-exist with Caste in India?" *Ilmu dan Budaya* Juni 1983 VI,9:688-694
2. "Peranan Wanita Betawi dalam Angkatan Kerja" *Jali-Jali. Journal of Betawi Socio-cultural Studies* I: 49-62 Nop. 1987
3. "Socio-Linguistic Aspects of Ethnic Identity" *Jali-Jali. Journal of Betawi Socio-cultural Studies* 1989
4. "Masalah Konsep Etnik Dalam Masyarakat Kompleks." *Warta Demografi* 1992

5. "Pemakai Bahasa Indonesia Menurut Sensus 1980 dan beberapa Penafsirannya" *Warta Demografi* 1992
6. "Re-kreasi Tradisi Orang Betawi" *Prisma No.6 TH XV Jun. 1996/7*
7. "Siapa Orang Betawi?" *Barnus Betawi* 1997
8. The Revelation, Revival and Nationalization of a fading Tradition" *Performing Arts International* 1998
9. "Alih Fungsi Seni Dalam Masyarakat Kompleks : Kasus Liang Liong dan Barongsai" *Jurnal Antropologi Indonesia* No. 61 TH XXIV Januari April 2000
10. *Muhammad Bakir. Mengenal Naskah Kuno Betawi. Jurnal Betawi Th I no.2/Juni 2002*
11. Lenong. Awal Kelahiran kembali Kebetawian di Jakarta. Contoh kasus Nasionalisasi Tradisi Lokal Yang Memudar *Jurnal Betawi Th I no. 1 2002*
12. "Barongsai. Rekacipta Tradisi Tercekal. Studi Alih Fungsi Seni Dalam Masyarakat Kompleks." Jakarta. *Jurnal Antropologi Indonesia* 2000
13. "Rekacipta Tradisi Betawi: Sisi Otoritas dalam Proses Nasionalisasi Budaya Lokal" *Jurnal Antropologi Indonesia* No. 66 XXV September-Desember 2002
14. "Seni Sebagai Ekspresi Eksistensi : Tantangan Kebijakan Kebudayaan Multikulturalisme". *Jurnal Antropologi Indonesia* 2003
15. Sistem Kekerabatan Sebagai Katalisator Peran Ulama Keturunan Arab di Jakarta. *Jurnal Antropologi Indonesia* No 2 TH XXIX 2006

#### **Artikel dipresentasikan di seminar**

1. Perkiraan Tingkat Kelahiran, Kematian dan Migrasi di Jakarta. Analisa Hasil Sensus LDFEUI 1976
2. "Culture and Fertility" Paper diajukan dalam Seminar "Culture and Fertility" di Singapura Agustus 1977

3. *Monografi Migrasi permanen di Propinsi Aceh. Analisa Data Sensus 1981* LDFEUI Jakarta
4. "Pengiriman Tenaga kerja ke Luar Negeri. Suatu Tinjauan Sosiologis." Disampaikan pada Sarasehan tentang Pengiriman Tenaga Kerja Wanita ke Luar Negeri. Diselenggarakan oleh Dewan Pimpinan Pusat Golkar 25 April 1985
5. *Tentang Wanita Betawi* Disampaikan pada seminar Betawi, FSUI 21-22 Februari 1986
6. *Bahasa Betawi dan Bahasa Jakarta.* Disajikan dalam Seminar Socio-Linguistic V 7-8 Februari 1989 FSUI Jakarta
7. "Perkembangan Bahasa Indonesia" Disampaikan dalam Perayaan Sumpah Pemuda di KBRI London 1991
8. *Sejarah Betawi Dalam Metropolitan Jakarta* Disajikan dalam seminar Betawi dan Metropolitan Fakultas sastra Universitas Indonesia 1992
9. *Nilai Kultural dan Cara-Cara penyampaiannya Bagi Pola Asuh Anak dan Remaja dalam Keluarga dalam Pokja BKKBN* 14 Desember 1995
10. *Aristocratic Betawi. A Challenge to Outsider's Perception* disajikan dalam Konperensi The History and Identity of Jakarta Leiden 12-13 April 1997
11. *Betawi Dalam realita dan Kenyataan.* 1997
12. *Tradisi Kuliner Betawi* Disajikan dalam Seminar Kuliner di FISIP UI 1997
13. *Peran Kebudayaan Daerah Bagi Pengembangan Kebudayaan Nasional* P&K 28 Agustus 1997
14. *Pengaruh Budaya Betawi Terhadap perkembangan Pembangunan Masyarakat DKI Jakarta Abad 21"* Kertas Kerja untuk Seminar Regional Mahasiswa DKI Jakarta 11 September 1997 di Hotel Cempaka
15. *Pola Pengasuhan Anak dalam keluarga Campuran* Disajikan dalam Pembinaan dan Pengembangan Kebudayaan Daerah Oleh P&K 25 Agustus 1998

16. *Wanita dan Perubahan Budaya* Disajikan dalam seminar "Pemberdayaan Wanita Penyandang Cacat dalam Upaya Meningkatkan Integrasi Nasional" oleh HWPCI (Himpunan Wanita Penyandang Cacat) 9 Desember 1998 di Kompleks Assyafiyah, Jatiwaringin
17. *Rumah Tradisional Betawi* Jum'at 17 April 1998 Departemen P&K
18. *Kearifan Lokal dalam Menata Lingkungan yang Harmonis* Kegiatan Pengembangan dan Pembinaan Kebudayaan P&K 10 Agustus 1999
19. *Redefinisi Budaya Nasional* Kegiatan Kursus Budaya Angkatan I oleh Lembaga Kajian Budaya Nusantara 13-14 November 1999
20. *Lenong. Awal kelahiran Kembali Kebetawian di Jakarta.* Disajikan dalam Pembinaan dan Pengembangan Kebudayaan Daerah. Departemen P&K 3 Februari 1999
21. *Barongsai. Rekacipta Tradisi Tercekal. Studi Alih Fungsi Seni Dalam Masyarakat Kompleks.* Disajikan dalam Jubileum Antropologi 6-8 Mei 1999
22. *Jakarta Sebagai Kota Pembauran Ulang Tahun Museum Sejarah Jakarta,* Agustus 1999
23. *"Kebudayaan Betawi Mencapai Masa Depan"* Acara Terminal Kreasi Budaya betawi di Bis Tingkat Kawasan SCDB 3 Agustus 1999
24. *"Perkampungan Budaya Betawi"* Lokakarya persiapan Pembangunan Perkampungan Budaya Betawi 30 Agustus 1999
25. *Gereja Betawi?* Jakarta, Januari 2000
26. *Strategi Adaptasi Masyarakat Betawi Menjawab tantangan Multi Etnis Jakarta.* Disajikan dalam seminar "Menyoal Daya Tahan Keseimbangan Tradisional, Sabtu 3 Juni 2000 di Hotel Wisata Internasional, Jakarta
27. *"Rekacipta Tradisi Betawi: Sisi Otoritas dalam Proses Nasionalisasi Budaya Lokal"* Disajikan dalam International Symposium & Workshop The Beginning of the 21<sup>st</sup> Century :

28. "Seni Sebagai Ekspresi Eksistensi : Tantangan Kebijakan Multikulturalisme" Disajikan dalam the 2<sup>nd</sup> International Symposium of Journal Antropologi Indonesia Globalization and Local Culture. A Dialectic towards the New Indonesia 18-21 Juli 2001
29. Kemajemukan dan Adaptasi Budaya Antar Etnis. Disajikan dalam kegiatan penyuluhan dalam rangka "Pembinaan dan Pengembangan Kebudayaan Daerah DKI Jakarta" dengan tema "Kebudayaan Sebagai Perekat Bangsa" pada 18 Oktober 2001 di Aula Kanwil Depdiknas DKI Jakarta
30. *Seni Sebagai Ekspresi Eksistensi. Tantangan Kebijakan Multikulturalisme* Disajikan dalam Symposium and Workshop Anthropology di Bali: Rebuilding Indonesia, a Nation of Unity in Diversity. Towards a Multicultural Society. 2002
31. Peran Nilai Budaya dasar dan Implikasinya Terhadap Kebijakan Politik Nasional. Disajikan dalam Diskusi Nasional yang diselenggarakan oleh Forum Komunikasi Mahasiswa Betawi pada tanggal 31 Oktober 2002 di Gedung Nyi Ageng Serang, Jakarta
32. Transformasi Iman dan Ilmu Dalam Budaya Jakarta. Makalah dalam Forum Studi Iman Ilmu Budaya, Sabtu 23 Agustus 2003 di Unika Atmajaya, Jakarta
33. *Betawi dalam Angka dan Permasalahannya*. Disampaikan dalam seminar "Betawi-Jakarta: Tinjauan Budaya" pada 28-29 Juli 2004 di Pusat Studi Jepang, Universitas Indonesia.
34. Melayu Betawi: Perkembangan dan Kontestasi. Makalah disajikan dalam seminar "Alam Melayu Sebuah Realitas Kemajemukan" 29 Juli – 1 Agustus 2004, di Tanjung Pinang Riau
35. Peran Tokoh Etnis Sebagai Perekat Kesatuan dan persatuan bangsa. Dipersentasikan dalam seminar "Peningkatan Peran Tokoh Etnis Dalam Memperkuat Kerukunan Hidup Antar Etnis di

DKI Jakarta, Rabu 29 September 2005 pada Pusat Kajian Strategi Pembangunan Sosial dan Politik

36. " Sistim Kekerabatan Sebagai Katalisator Peran Ulam Keturunan Arab di Jakarta." Disajikan dalam Symposiur Internasional Jurnal Antropologi di Jkarta Juli 2005
37. "Perkampungan Budaya Betawi. Studi Kasus Daya Tahan Hidu Etnik Betawi di Masa Depan." Dipersentasikan dalam Talkshov di kampus Sekolah Tinggi Pariwisata Trisakti dalam rangk Pekan Kebudayaan Betawi 19 September 2005 .

